



# Potret Perubahan FORCLIME

Pemantauan Dampak Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME)  
Modul Kerja Sama Teknis

**Diterbitkan oleh:**

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
FORCLIME Forests and Climate Change Programme  
Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII, Lantai 6 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270, Indonesia  
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214  
Fax: +62 (0)21 572 0193  
[www.forclime.org](http://www.forclime.org)

**Bekerja sama dengan:**

Ministry of Environment and Forestry

**Penulis :**

Nina-Maria Gaiser, ResultsinHealth

**Foto milik:**

FORCLIME, [https://i.ytimg.com/vi/\\_PrLVJ54UJA/maxresdefault.jpg](https://i.ytimg.com/vi/_PrLVJ54UJA/maxresdefault.jpg) (story 3)  
Agus Justianto, Albertus Tjiu, Darmawan Isnaeni, Duratma Momo, Irawan Sihombing, Rita, Wikan Hartati

**Dicetak dan didistribusikan oleh:**

FORCLIME

**Jakarta, Januari 2017**

Forests and Climate Change (FORCLIME)

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

# Potret Perubahan FORCLIME

Pemantauan Dampak Program Hutan dan  
Perubahan Iklim (FORCLIME), Modul Kerja Sama  
Teknis





# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>v</b>
<b>Ucapan Terima Kasih</b>	<b>1</b>
<b>Tentang FORCLIME</b>	<b>2</b>
<b>Apa, Mengapa dan Proses MSC dalam FORCLIME</b>	<b>3</b>
<b>Suatu Potret Perubahan FORCLIME</b>	<b>4</b>
<b>Tema 1. Kebijakan tentang Hutan dan Perubahan Iklim</b>	<b>5</b>
<b>Tema 2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)</b>	<b>11</b>
<b>Tema 3. Integrasi Konservasi dan Pembangunan – Ekonomi Hijau</b>	<b>17</b>
<b>Tema 4. Pengembangan Kapasitas SDM untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan</b>	<b>24</b>
<b>Tema 5. Perbaikan Tata Kelola Hutan Melalui Penyelesaian Konflik dan Pemetaan Partisipatif</b>	<b>30</b>
<b>Tema 6. Gender</b>	<b>35</b>
<b>Tema 7. Pembelajaran</b>	<b>40</b>
<b>Langkah Kedepan</b>	<b>48</b>



LAMIN ADAT  
ADJANG LIDEM  
DESA SETULANG  
KEC: MALINAU SELATAN  
KABUPATEN MALINAU



## KATA PENGANTAR

Melalui program kerja sama yang berorientasi pada dampak, pelaksanaan kerja sama internasional saat ini bertujuan untuk lebih efektif dan transparan dalam mencapai dampak dan memanfaatkan dana. Untuk itu membutuhkan metode Monitoring dan Evaluasi (M & E) yang mampu mencerminkan kemajuan ini dan memberikan pembelajaran tentang transparansi, efisiensi dan dampak dari pelaksanaan kegiatan di semua tingkat.

GIZ dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyadari akan pentingnya pembelajaran tentang efisiensi, dampak dan transparansi dari kegiatan yang dilaksanakan bersama. Oleh karenanya, kami memulai proses belajar, dengan fokus pada perbaikan kualitas dan pembelajaran sebagai tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan *Forests and Climate Change Programme* (FORCLIME).

Untuk itu, FORCLIME Modul Kerja Sama Teknis (TC) melakukan monitoring dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik Perubahan Paling Signifikan (Most Significant Change - MSC). Pendekatan MSC merupakan bentuk kualitatif dan partisipatif dari M & E yang didasarkan pada koleksi, seleksi yang sistematis dan analisis dari cerita perubahan signifikan dalam kehidupan individu (yang terlibat dalam program) sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan program.

Keluaran dari pendekatan monitoring ini, memberikan kontribusi terhadap proses belajar FORCLIME dan mitranya. Sehingga memungkinkan kami untuk melihat hasil program dan membandingkannya dengan kerangka perencanaan yang ada. Dari hasil monitoring program menggunakan teknik MSC, FORCLIME dan mitranya dapat melakukan kaji ulang bersama terkait dengan strategi program FORCLIME untuk mengakomodasi prioritas mitra FORCLIME dan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan merasa memiliki program FORCLIME.

Dengan menggunakan teknik MSC dan kisah-kisah yang dikumpulkan, FORCLIME juga dapat mengomunikasikan dampak yang dirasakan telah dicapai kepada mitranya melalui suara dari orang-orang yang telah terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan FORCLIME. Saya berharap pembaca menikmati kisah dari para penutur cerita mengenai hasil yang diharapkan dan yang tidak diharapkan seperti yang telah saya rasakan.

Salam hangat,



**Georg Buchholz**

Direktur Program FORCLIME





## UCAPAN TERIMA KASIH

FORCLIME sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku Kisah-kisah Perubahan Paling Signifikan (*Most Significant Change*-MSC).

Khususnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua mitra FORCLIME di Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, yang telah meluangkan waktu dan berbagi cerita dan pengalaman bersama FORCLIME. Kami sampaikan terima kasih juga kepada perusahaan konsultasi ResultsinHealth atas dukungannya dalam pelaksanaan proses MSC.

Juga kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas dukungan yang terus menerus sebagai lembaga pelaksana program FORCLIME.

## Tentang FORCLIME

Seperti kita ketahui, Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran tahunan pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen untuk beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi ini sebagian besar akan berasal dari pembangunan ekonomi berbasis lahan seperti konsesi kelapa sawit, hutan tanaman untuk bubur kertas dan kertas, dan pertambangan. Sementara itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% (atau 41% dengan bantuan dari luar) pada tahun 2030 dari tingkat emisi yang dihasilkan dari 'kegiatan seperti biasanya' (*business as usual*) – yang batas dasarnya masih harus ditentukan.

Kita bisa melihat adanya dilema di sini. Ekspansi yang tak terkendali dalam sektor kelapa sawit, bubur kertas dan kertas, dan pertambangan merupakan penyebab utama berkurangnya hutan. Sementara, untuk mencapai sasaran pengurangan emisi diperlukan perubahan mendasar dalam pemanfaatan hutan sambil terus meningkatkan cadangan karbon dengan menanam pohon dan merehabilitasi hutan. Maka tantangannya adalah mempertahankan pertumbuhan yang memperbaiki kehidupan masyarakat miskin di pedesaan namun bisa membatasi konversi hutan alam yang terencana dan mencegah berkurang dan rusaknya hutan yang tak terencana.

Program Hutan dan Perubahan Iklim (*Forests and Climate Change Programme* - FORCLIME) adalah program kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman. Program ini dilaksanakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Melalui Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME), Pemerintah Jerman mendukung pemerintah Indonesia dalam merancang dan melaksanakan pengelolaan hutan lestari yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan meningkatkan kehidupan masyarakat miskin pedesaan di Indonesia. Dukungan langsung Pemerintah Jerman terpusat dalam membantu kesiapan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*Reducing emissions from deforestation and forest degradation* – REDD) masa depan.

Tujuan dari Program FORCLIME adalah: pemangku kepentingan, baik dari sektor publik dan swasta, mampu memperbaiki kerangka kelembagaan dan peraturan perundangan untuk pengelolaan hutan lestari, konservasi alam, dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Dalam jangka panjang, melalui program ini emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan berkurang seraya meningkatkan kehidupan masyarakat miskin pedesaan di Indonesia.

Elemen-elemen kunci dari kerja sama teknis FORCLIME adalah dukungan untuk pembentukan perbaikan operasional dan struktur tata kelola hutan lestari, seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan pengaturan pengelolaan kolaboratif untuk kawasan lindung. FORCLIME berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan strategi di bidang perubahan iklim dalam konteks pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dengan memberikan pengalaman praktis di tiga kabupaten percontohan di Kalimantan, yaitu Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Malinau (Kalimantan Utara) dan Berau (Kalimantan Timur).

Untuk mencapai dampak yang diharapkan, kerja sama teknis FORCLIME dilakukan melalui enam Bidang Strategis (*Strategic Area, SA*):

1. Kebijakan kehutanan, perencanaan strategis dan pengembangan kelembagaan;
2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
3. Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);
4. Integrasi konservasi dan pembangunan (Ekonomi Hijau);
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Keragaman Hayati dan Pengelolaan Kawasan Lindung.

## Apa, Mengapa dan Proses MSC dalam FORCLIME

Belakangan ini, program-program pembangunan mengalami pergeseran orientasi ke arah “orientasi pada dampak”, mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Orientasi ini bertujuan agar program pembangunan menjadi lebih efektif, transparan, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Dibutuhkan metodologi monitoring dan evaluasi (M&E) yang mampu merefleksikan perkembangan ini dan mampu memberikan pembelajaran mengenai transparansi, efisiensi dan dampak dari pelaksanaan program-program pembangunan di semua tingkatan. Kerja sama Teknis Jerman, dilaksanakan melalui GIZ, menyadari pentingnya menyediakan pembelajaran tentang efisiensi, dampak dan transparansi dari program-program yang dilaksanakan, juga tantangannya. Untuk itu GIZ memperbaharui kebijakan monitoring dan evaluasinya, yang antara lain menekankan pada perbaikan kualitas dan pembelajaran sebagai tujuan dari M&E GIZ.

Sejalan dengan latar belakang di atas, FORCLIME-TC melakukan monitoring kualitatif dengan menggunakan teknik *Most Significant Change* (MSC, Perubahan Paling Signifikan). Teknik ini adalah bentuk M&E kualitatif dan partisipatif yang didasarkan pada pengumpulan cerita, pemilihan cerita secara sistematis dan analisis cerita-cerita perubahan penting dalam kehidupan seseorang atau sekelompok orang sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan pembangunan. Teknik ini dikembangkan oleh Rick Davies di Bangladesh lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat ini, teknik tersebut digunakan secara luas dalam pengembangan komunitas dan institusi, termasuk di Indonesia.

Suatu program biasanya memiliki sejumlah indikator keberhasilan yang ditentukan pada saat menyusun perencanaan program. Indikator ini dimonitor dan dievaluasi capaiannya secara reguler selama program berjalan. Salah satu kelebihan MSC adalah bahwa dengan teknik ini orang ‘diperbolehkan’ untuk memiliki indikator keberhasilan sendiri, sesuai dengan yang mereka rasakan atau mereka alami, yang bisa jadi jauh dari indikator dalam perencanaan program. Berbeda dengan sistem M&E tradisional, teknik ini meminta penerima manfaat program mengidentifikasi sendiri perubahan-perubahan penting, baik itu positif maupun negatif, yang terjadi pada dirinya sebagai hasil dari program yang mereka ikuti. Perubahan mendasar yang dirasakan dapat berbeda-beda berdasarkan individu, kelompok, dan budaya. Cerita-cerita Perubahan Signifikan yang dikumpulkan berupa beragam cerita dari sudut pandang penutur ceritanya. Penggunaan teknik bercerita memungkinkan kita untuk sungguh-sungguh memahami proses munculnya perubahan. Proses ini juga memberi ruang bagi semua yang terlibat untuk memahami nilai masing-masing melalui dialog yang dinamis. Spirit partisipatif dari teknik ini ditangkap melalui keterlibatan para penerima manfaat dan pemangku kepentingan proyek dalam menganalisis data dan menentukan perubahan yang paling signifikan di antara berbagai perubahan, untuk dilaporkan. Ini memberi ruang bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dampak program, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.

Hasil dari penggunaan teknik MSC ini diharapkan menjadi proses pembelajaran bagi FORCLIME dan mitranya untuk dapat melihat hasil program yang melampaui kerangka perencanaan yang sudah ada. Bagaimana hasil penggunaan teknik MSC ini bisa menjadi pembelajaran? Penggunaan teknik MSC ini juga diharapkan dapat membantu GIZ dalam mengomunikasikan perubahan-perubahan dan dampak yang dihasilkan dari program FORCLIME kepada mitra-mitranya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, serta masyarakat luas.

Teknik MSC ini sendiri dilakukan melalui beberapa langkah utama:

1. Pertama, FORCLIME menginformasikan kepada staf dan mitra tentang akan digunakannya teknik ini beserta tujuannya.
2. Kemudian dilakukan pengumpulan dan penulisan cerita perubahan.

3. Dari sini, dilakukan pemilihan atas semua cerita perubahan yang sudah ditulis. Pemilihan dilakukan oleh panel dalam sebuah lokakarya di Jakarta.
4. Analisis data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui cerita/penuturan.

Umpan balik kepada penutur cerita merupakan hal penting dalam proses MSC. Umpan balik dapat memasukan bagaimana kisah dari MSC digunakan oleh Program di dalam system M&E, atau mengapa kisah tertentu dipilih oleh para pihak sebagai perubahan paling signifikan. Buku ini berisi kumpulan kisah MSC yang telah diidentifikasi oleh tim FORCLIME, mencerminkan perubahan paling signifikan yang dirasakan oleh mitra-mitra yang berinteraksi dengan FORCLIME.

## Suatu Potret Perubahan FORCLIME

Ada banyak sekali perubahan yang berhasil dipotret selama proses pengumpulan cerita perubahan ini. Perubahan, sekecil apapun, adalah perubahan. Perubahan dihasilkan dari sebuah atau serangkaian upaya yang kadang-kadang tak mudah. Oleh karena itu, perubahan positif bisa memberi guyuran energi yang luar biasa besar bagi mereka yang berproses di dalamnya.

Proses pengumpulan cerita perubahan ini melibatkan sejumlah orang sebagai penutur cerita. Siapakah orang-orang ini? Mereka adalah para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program FORCLIME, yaitu pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten, KPH, pusat pendidikan pelatihan kehutanan, LSM dan organisasi kemasyarakatan, serta tokoh dan anggota masyarakat. Mereka dipilih dengan mempertimbangkan keterwakilan enam bidang strategis dan daerah dimana program FORCLIME dijalankan, yaitu Jakarta, Bogor, Samarinda, Pontianak, Berau, Malinau, dan Kapuas Hulu.

Potret-potret perubahan ini disajikan dalam tujuh tema, sejalan dengan 'anatomi' dan prioritas FORCLIME. Ketujuh tema tersebut adalah:

- (1) Kebijakan tentang hutan dan perubahan iklim
- (2) Pengembangan KPH
- (3) Ekonomi Hijau
- (4) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
- (5) Meningkatkan tata kelola hutan melalui penyelesaian konflik dan pemetaan partisipatif
- (6) Gender
- (7) Pembelajaran

## Tema 1.

### Kebijakan tentang Hutan dan Perubahan Iklim

FORCLIME mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kerangka peraturan bagi pengelolaan hutan lestari melalui reformasi administratif, termasuk pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dukungan penting lainnya ditujukan untuk persiapan pelaksanaan mekanisme REDD+ di masa depan. FORCLIME dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja dalam menyiapkan regulasi dan kelembagaan yang diperlukan, bersama-sama dengan mitra program pembangunan lainnya.

Perubahan dalam tema ini dituturkan oleh mereka yang bekerja di pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mereka adalah pelaku perubahan yang telah berproses dalam perbaikan kebijakan, peraturan, dan pedoman kerja. Kini mereka merasakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program menjadi lebih baik. Isu perubahan iklim yang dulu tidak tersentuh, sekarang masuk dalam tubuh pemerintah dalam bentuk rencana strategis (Renstra) sehingga ada anggaran yang dialokasikan untuk itu. Selain soal Renstra, program daerah dari tahun ke tahun juga menjadi jelas target dan ukurannya; ada indikator kinerja sehingga hasil program menjadi lebih baik. Kerja sama dengan FORCLIME juga mendorong penyusunan kerangka kebijakan KPH, atau membantu menyiapkan Sistem Informasi Keamanan (*Safeguards Information System-SIS*) untuk REDD+, serta memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Lima cerita dibawah ini mencerminkan perubahan-perubahan dalam tema Kebijakan tentang Hutan dan Perubahan Iklim.

## Cerita 1: Peningkatan Wawasan dan Penguatan Kapabilitas dalam Pembuatan Renstra Meningkatkan Kinerja

*Kelompok penutur: Pemerintah Propinsi dan Kabupaten*

*Asal cerita: Samarinda, Kalimantan Timur*

**“Penambahan wawasan ini penting karena berefek pada kinerja saya.”**

Saya melihat Program FORCLIME telah menghasilkan banyak perubahan, antara lain adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan tahun 2014-2019. Terdapat perbedaan yang signifikan antara Renstra Tahun 2014-2019 dengan Renstra periode sebelumnya, dimana pada Renstra yang penyusunannya didukung oleh FORCLIME telah dapat memasukan Program Mitigasi dan Perubahan Iklim sehingga memudahkan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Adanya dukungan FORCLIME telah membawa perubahan besar bagi diri saya sendiri yaitu dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan mengenai isu perubahan iklim. Saya merasa wawasan saya sebagai birokrat sangat terbatas namun setelah bekerja sama dengan FORCLIME saya mendapat tambahan pengetahuan dan referensi isu perubahan iklim yang cukup banyak sehingga dapat memudahkan saya dalam bekerja dan menjalankan tugas sehari-hari sesuai tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Renstra merupakan dasar dan acuan dalam proses pengusulan anggaran untuk Rencana Kerja Kegiatan setiap tahun karena dalam Renstra telah disusun rencana pagu anggaran per tahun untuk jangka waktu lima tahun (sesuai masa berlakunya Renstra). Dengan adanya pagu anggaran per tahun dalam Renstra sangat memudahkan dalam penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu bertambahnya wawasan saya atas dukungan FORCLIME sangat berpengaruh pada kinerja saya. Saya merasa lebih mudah menjelaskan terkait isu perubahan iklim terhadap

para *stakeholder* yang membutuhkannya.

Perubahan ini terjadi karena adanya pendampingan FORCLIME terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. FORCLIME juga telah membantu proses pengolahan dan penyajian data, dan apabila ada permasalahan terkait isu perubahan iklim, saya dapat konsultasi dan berdiskusi langsung dengan teman-teman FORCLIME yang berada dalam gedung yang sama. Tugas-tugas sebagai analisis GIS dibantu oleh 2 staf Dinas Kehutanan yang telah mengikuti pelatihan GIS di Bogor atas dukungan FORCLIME.



Ir. Duratma Momo adalah Kepala Seksi bidang Perencanaan dan Tataguna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Pak Momo telah terlibat dalam program FORCLIME sejak program ini dimulai pada tahun 2010, khususnya dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

## Cerita 2: Manfaat Sistem Informasi Safeguard REDD+

Kelompok penutur: Pemerintah Pusat  
Asal cerita: Jakarta

**“ kerja sama ini merupakan kerja sama yang sangat efektif dimana kami kerja bersama mulai dari nol sampai ada outputnya yaitu terbangunnya SIS-REDD+.”**

Ada beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan bersama FORCLIME, namun yang saya rasakan paling penting dan bermanfaat adalah kerja sama dalam penyusunan sistem informasi perlindungan (*Safeguard Information System/ SIS*) untuk REDD+ selama 2011-2014. Pihak FORCLIME sendiri juga mengakui ini merupakan kerja sama yang sangat efektif. Kami bekerja bersama mulai dari nol sampai ada hasilnya yaitu terbentuknya SIS REDD+ tersebut.

Dukungan FORCLIME disini sangat nyata; tidak hanya sekedar dukungan keuangan, mereka juga mendukung kami dalam pertemuan atau acara serta aktif dalam diskusi. Komunikasi juga berjalan dengan baik.

Dengan memiliki SIS ini berarti kita sudah melaksanakan mandat COP 16 yang mewajibkan negara pelaksana REDD+ untuk memiliki *safeguard* sebagai kerangka pengaman untuk mengantisipasi dampak buruk akibat kegiatan REDD+. SIS juga memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan *safeguard* REDD+. Kegiatan-kegiatan pengumpulan informasi ini membuat kami harus mengenal dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan para pelaku kegiatan REDD+ sehingga kami jadi tahu “segala tetek bengek” REDD+. Kami juga bisa membuat profil umum serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan REDD+. Kami juga berbagi tentang pembelajaran mengenai SIS ini dengan banyak negara

terutama negara-negara di Asia. Saat ini kami juga sedang menyiapkan bahan-bahan yang akan disusun menjadi ringkasan informasi tentang bagaimana *safeguards* REDD+ diatasi dan dihormati, yang nantinya akan dilaporkan ke UNFCCC. Jadi banyak sekali manfaat pengembangan SIS ini.

Selain itu, ada manfaat lain yang kami petik dari kerja sama dengan FORCLIME yaitu kami menjadi sering bertukar informasi seputar REDD+, melakukan kegiatan bersama seperti diskusi tentang iklim ekonomi dan kajian regulasi yang terkait dengan REDD+. Kami juga pernah mendapatkan bantuan untuk bisa berbagi informasi dengan teman-teman mitra. Saya rasa bermanfaat sekali bisa berbagi dengan forum yang bekerja di bidang yang sama.



Cerita ini dituturkan oleh Ibu Novia Widyaningtyas (Kepala Subdirektorat REDD+ di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang terlibat dalam FORCLIME sejak tahun 2011 dan berperan sebagai penghubung utama dalam berbagai bidang strategis yang terkait dengan REDD+.

### Cerita 3: Perubahan Komunikasi yang Mendorong Perbaikan Kebijakan

*Kelompok penutur: Pemerintah Pusat*

*Asal cerita: Jakarta*

**“Peningkatan komunikasi ini mendorong perbaikan kebijakan untuk mempercepat beroperasinya KPH.”**

Perubahan yang paling mendasar dengan adanya kerja sama dengan FORCLIME adalah adanya instrumen (pengetahuan dan alat kerja) untuk meningkatkan komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan berbagai pemangku kepentingan lain. Peningkatan komunikasi ini telah mendorong revisi kebijakan untuk mempercepat beroperasinya KPH. Perubahan ini terjadi selama tahun 2012-2014. Saat itu saya mempunyai waktu untuk mempelajari kondisi di lapangan dan menganalisis peraturan-peraturan yang ada. Saya lihat kebijakan KLHK perlu diubah karena banyak kelemahannya dan ada cukup banyak faktor yang mendukung perubahan itu. Setelah mempelajarinya dengan seksama, saya memiliki argumen yang kuat untuk melakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan tersebut. Mekanisme perubahan kebijakan pun telah semakin kuat berkat dukungan dari luar pemerintahan.

Perubahan ini paling bermakna buat saya karena sebagai akademisi, pengetahuan adalah modal utama saya. Dampak dari perubahan ini dirasakan oleh semua direktorat jenderal di KLHK yang terkait erat dengan KPH.

Perubahan lain yang terjadi sejak 2013 adalah adanya kajian Litbang KPH untuk perbaikan sistem dan kebijakan di 12 kementerian serta

rencana aksi untuk melaksanakan hasil kajian tersebut. Perubahan ini terjadi karena adanya kekuatan untuk melakukan perubahan (antara lain karena dikaitkan dengan penegakan hukum) dengan lebih terbuka dan untuk bersama-sama mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut. Tentu saja perubahan ini juga penting karena menjadi bahan penyusunan strategi. Selain itu, substansi perubahan secara rasional dapat diterima, dilandasi fakta di lapangan, dan didasarkan pada kajian yang bisa dipercaya. Perubahan dalam sistem dan kebijakan di 12 kementerian ini berdampak pada para pelaku utama dalam pembangunan kehutanan yaitu masyarakat dan pelaku usaha.



*Photo of Hariadi Kartodihardjo taken from: [https://i.ytimg.com/vi/\\_PrVJ54UA/maxresdefault.jpg](https://i.ytimg.com/vi/_PrVJ54UA/maxresdefault.jpg)*

Cerita ini dituturkan oleh Pak Hariadi Kartodihardjo, seorang peneliti tentang pengarusutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan penulis buku KPH-2 yang terlibat dalam FORCLIME sejak tahun 2012



## Cerita 4: FORCLIME itu Satu

*Kelompok penutur: Pemerintah Pusat*

*Asal cerita: Jakarta*

**“Ibu Menteri telah mempercayakan FORCLIME untuk melakukan presentasi dalam pertemuan-pertemuan.”**

Belajar dari tinjauan tengah waktu, kami diarahkan bagaimana FORCLIME TC dan FC harus menjadi satu badan sehingga saya mengambil keputusan bahwa tidak boleh ada dua kantor di satu kawasan. Dengan demikian FORCLIME menjadi satu nama dan mulai bisa menyusun jati diri. Sebelumnya, dua kantor ini masih tampak berjalan sendiri-sendiri: TC harus mengikuti rencana kerja tahunan FC dan pembahasan tentang TC harus diikuti oleh FC. Sebagai PEA saya sangat tegas agar FORCLIME fokus di tiga provinsi wilayah kerjanya yaitu: Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Ketiga provinsi itu akan dikembangkan terlebih dahulu dan kalau sudah berhasil dengan baik, proyek akan ditingkatkan hingga ke tingkat nasional.



Selama tiga tahun terakhir saya telah melihat perubahan-perubahan penting sejak FORCLIME diimplementasikan. Ibu Menteri telah mempercayakan FORCLIME untuk melakukan presentasi dalam pertemuan-pertemuan. Saya melihat kemitraan GIZ sebagai suatu kesetaraan dan GIZ sangat menjunjung tinggi kemitraan sehingga memudahkan kita untuk berkoordinasi. Jadi nilai-nilai persahabatan itu muncul dalam kemitraan tersebut. Saya juga sudah mulai untuk meminta contoh hasil (produk) program FORCLIME dari lapangan, misalnya madu yang selalu saya pergunakan untuk mempromosikan program FORCLIME. Capaian FORCLIME FC mulai meningkat dan masih perlu ditingkatkan lagi, sedangkan TC sudah cukup bagus. Selain itu kualitas koordinasi antar penanggung jawab program sudah meningkat.

Bagi saya perubahan yang paling penting selama berkecimpung di program ini adalah bersatunya FORCLIME TC dan FC sebagai satu unit di lapangan. Mungkin masih ada kekurangan di sana-sini, akan tetapi upaya untuk menjadi FORCLIME yang satu sudah mulai terlihat dan terasa. FORCLIME ya FORCLIME (baik TC dan FC). Keduanya mempunyai tujuan yang sama tapi mereka menggunakan cara mereka masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut sesuai mandat lembaga masing-masing. Tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa TC itu GIZ dan FC itu KFW; FORCLIME adalah kerja sama tiga lembaga yaitu GIZ, KFW, dan KLHK. Langkah pertama yang harus kita tempuh untuk mewujudkan FORCLIME yang satu adalah dengan berada di satu kantor sampai dengan di tingkat daerah. Hal ini penting karena akan menjadikan program terintegrasikan di tingkat lapangan dan itu menjadi kunci keberhasilan program di tingkat nasional sebagai fondasi untuk peningkatan nantinya.

Cerita ini dituturkan oleh Pak Helmi Basalamah. Pak Helmi sebelumnya adalah Kepala Pusdiklat Bogor dan saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan. Responden terlibat dalam program FORCLIME sejak menjabat sebagai Kepala Pusdiklat (2008-2012) hampir empat tahun yang lalu (awal 2012). Sebagai Kepala Biro Perencanaan, beliau adalah penanggung jawab *Programme Executing Agency* (PEA).

## Cerita 5: Berproses Bersama Menyusun Kebijakan

*Kelompok penutur: Pemerintah Pusat*

*Asal cerita: Jakarta*

**“Bagi saya perubahan yang sangat penting adalah proses-proses yang dilakukan dalam membuat kebijakan, kami banyak belajar dari proses-proses tersebut.”**

Selama terlibat dalam program FORCLIME saya telah menyaksikan beberapa perubahan penting. Salah satunya adalah banyaknya aktivitas peningkatan kapasitas untuk pemerintah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program, yang saat ini sudah jauh lebih baik di pemerintah tingkat pusat, provinsi sampai dengan kabupaten dan tingkat desa. Aktivitas-aktivitas yang didukung oleh GIZ, termasuk FORCLIME ini, sifatnya adalah untuk mengisi kesenjangan, yaitu pos-pos kosong yang tidak bisa dibiayai oleh pemerintah karena keterbatasan dana. Disini saya belajar pengelolaan dana yang berbeda dengan pengelolaan dana dari APBN.

Pada saat saya terlibat dalam FORCLIME, saya juga banyak belajar bagaimana menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini saya pelajari dari program GTZ di Sumatera Barat. Saya juga belajar bahwa rencana strategis dan pedoman-pedoman di tingkat provinsi dan kabupaten juga harus sesuai dengan rencana strategis di tingkat kementerian. Saya melihat FORCLIME sangat mendukung proses penyusunan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, termasuk pada saat menyusun RPJM baru-baru ini untuk satu kementerian yang kemudian digabungkan dengan kementerian lain menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena penggabungan ini, kami harus mengubah rancangan yang sudah ada. FORCLIME memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk penyusunan RPJM gabungan tersebut.

Bagi saya perubahan yang sangat penting adalah proses-proses yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan; kami banyak belajar dari proses-proses tersebut, jadi tidak semata-mata melihat hasil akhirnya saja. Bagi saya perubahan ini paling penting karena kalau seluruh proses sudah diikuti, hasilnya juga akan tercapai. Sebagai contoh sekarang kami mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang bisa dipergunakan sebagai acuan selama lima tahun ke depan, yang dihasilkan melalui proses yang partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian dokumen-dokumen ini tidak hanya sekedar menjadi dokumen tetapi menjadi acuan bagi kami dalam melaksanakan program.



Cerita ini dicitrakan oleh Pak Wasposito (mantan Kepala Bagian Rencana Umum Kehutanan, Biro Perencanaan) yang terlibat dalam program FORCLIME sejak 2010 sampai dengan awal 2015 sebagai *Programme Executing Agency* (PEA). Saat ini Pak Wasposito telah menduduki jabatan baru sebagai Kasubdit Reklamasi dan Rehabilitasi di KLHK. Pak Wasposito sangat paham program GIZ sejak waktu beliau bekerja di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

## Tema 2.

### Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

FORCLIME mendukung pembangunan KPH di Indonesia pada tingkat nasional dan tingkat daerah. Dukungan di tingkat nasional meliputi pengembangan kebijakan yang relevan dengan pembangunan KPH serta peningkatan kapasitas secara umum. Sementara pada tingkat daerah FORCLIME mendukung implementasi perancangan, perencanaan hingga pengelolaan KPH. Oleh karena itu, FORCLIME mendukung secara aktif pembangunan KPH Model di Kabupaten Berau (Provinsi Kalimantan Timur), Kabupaten Kapuas Hulu (Provinsi Kalimantan Barat) dan Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Utara).

Cerita-cerita perubahan dalam tema Pembangunan KPH ini adalah pengalaman luar biasa dari staf pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Kelembagaan KPH, gagasan yang awalnya tak mendapat tempat itu, kini telah mencuri perhatian; semua mata tertuju padanya. Proses pembentukan dan pengembangannya telah menjadi media untuk peningkatan kapasitas staf pemerintah dalam beberapa aspek. Dari embrio hingga KPH dibesarkan inilah mereka belajar membuat Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), berjejaring untuk memperkaya informasi, menyusun standar kompetensi teknis bidang kehutanan serta standar kompetensi dan sertifikasi KPH, mengelola dan menganalisis *database*. Juga, mereka yang dulu hanya tahu bahwa hutan itu hanya menghasilkan kayu, kini mereka paham bahwa hasil hutan itu tidak hanya kayu. Pendek kata, mereka telah menjadi 'saksi hidup' atas lahir, tumbuh, dan berkembangnya KPH; dan merekapun berkembang bersamanya. Lima cerita dibawah ini akan memberikan gambaran tentang berbagai perubahan tentang Pembangunan KPH.



## Cerita 6: RPHJP adalah Kunci KPH

*Kelompok penutur: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

**“Bagi saya perubahan yang sangat penting adalah penguatan KPH karena tanpa itu kita tidak dapat menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang”**

Satu perubahan yang terjadi sejak adanya FORCLIME adalah banyaknya kegiatan bersama yang dilakukan, salah satunya adalah untuk mendukung pembentukan KPH. Pada tahun 2010 pembentukan KPH diusulkan dan pembiayaannya dibantu oleh GIZ. Bantuan GIZ untuk KPH ini terkait dengan peningkatan kapasitas saya sebagai Kepala KPH dan juga kepada staf-staf saya melalui pendampingan dan pelatihan. Mereka juga membiayai kegiatan sosialisasi di beberapa desa dan beberapa kecamatan. Kami sendiri di KPH pada tahun 2012 belum mempunyai anggaran khusus. Kami mendapat anggaran yang kecil dari dinas padahal jumlah personilnya cukup banyak di KPH. GIZ memberikan bantuan sehingga kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan.

Perubahan lainnya adalah penguatan KPH dalam perencanaan. Berkat pendampingan oleh staf GIZ, kami mampu menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang menjadi syarat utama untuk KPH dalam menjalankan programnya selama 10 tahun. Sayangnya, sampai saat ini RPHJP ini masih belum ditandatangani oleh pemerintah provinsi karena provinsi belum menerima model KPH Kapuas Hulu. RPHJP ini penting karena untuk mengembangkan hutan diperlukan persiapan.

1. Versi awal RPHJP telah disetujui. Namun karena perubahan struktur organisasi di tingkat nasional (Kementerian Kehutanan digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014), seluruh KPH diminta untuk menyampaikan RPHJPnya. RPHJP KPH Kapuas Hulu saat ini masih dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil kajian diharapkan selesai paling lambat bulan Juni 2016.

Jadi tahapan itu yang kami persiapkan, seperti penyiapan lahan, penyusunan rencana tata ruang, dan peningkatan kapasitas teman-teman. Sebenarnya RPHJP adalah kunci bagi KPH. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai definisi khusus tentang tipologi KPH. Apabila RPHJP belum disahkan, KPH masih masuk tipe C dan hanya akan mendapatkan sedikit dana. Apabila sudah disahkan, KPH akan masuk tipe B atau tipe A dan mendapatkan pendanaan yang besar<sup>1</sup>.

Perubahan yang lain dengan adanya GIZ ini adalah kita menjadi bagian jaringan KPH-KPH yang menjadi dampingan GIZ di Kalimantan serta jaringan KPH-KPH di daerah lain seperti Yogyakarta dan Bali. Melalui jejaring ini kami bisa bertukar informasi dan saling belajar.

Dari semua perubahan tersebut, menurut saya perubahan yang paling bermakna adalah penguatan KPH karena berkat penguatan tersebut kami mampu menyusun rancangan RPHJP.



Cerita ini disampaikan oleh pak Welli Azwar, B.For., Kepala KPH Kapuas Hulu, yang telah berdiri sejak 2011. Sebelum menjadi Kepala KPH di tahun 2013, pak Welli telah terlibat secara intensif dalam menyiapkan kegiatan program FORCLIME di Kapuas Hulu sejak tahun 2009.

## Cerita 7: Kemitraan yang Mengatasi Keterbatasan

*Kelompok Penutur: Pemerintah Pusat  
Asal cerita: Jakarta*

***“Kami menemukan ide-ide yang bermanfaat. Ini juga proses belajar bagi kami, bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pembelajaran yang kami ambil adalah kami belajar untuk membuka mindset serta belajar mendengar untuk menerima masukan-masukan yang penting dari pihak-pihak lain.”***

Bagi saya perubahan yang paling bermakna adalah organisasi KPH dapat beroperasi dengan baik sebagai unit manajemen hutan di tingkat tapak. Sebagai organisasi tingkat tapak yang baru terbentuk, KPH telah dikembangkan dengan intensif sebagai upaya perbaikan tata kelola kehutanan. Walaupun demikian,



kami masih menghadapi kendala, baik dari sisi keuangan, pengetahuan, serta strategi dalam mencari bentuk/format kelembagaan yang efektif, minim struktur tapi kaya fungsi.

Melalui dukungan mitra seperti FORCLIME dalam penguatan kapasitas, peningkatan pengetahuan dan keahlian, dan fasilitasi kegiatan-kegiatan penting lainnya bagi KPH, kami dapat melakukan terobosan untuk percepatan pembangunan KPH, termasuk dengan dibentuknya Sekretariat Nasional KPH. Berkembangnya KPH dengan pesat seperti sekarang ini karena adanya dukungan dan kerja sama berbagai pihak diantaranya dukungan dari FORCLIME.

Sekretariat Nasional (Seknas) KPH membantu di dalam menganalisis berbagai kebutuhan yang diperlukan agar operasionalisasi KPH dapat berjalan dalam koridor yang benar. Pertemuan-pertemuan penting untuk koordinasi KPH, yang tidak dibiayai oleh APBN, didukung pelaksanaannya oleh FORCLIME. Dengan demikian kerja-kerja untuk percepatan bisa dikordinasikan dan direalisasikan lebih cepat.

Beberapa KPH model dapat dilakukan percepatan pengembangannya melalui kerja sama dengan FORCLIME seperti KPHP Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), KPHP Malinau (Kalimantan Utara), dan KPHP Gularaya (Sulawesi Tenggara).

Melalui kemitraan dengan GIZ FORCLIME, kami mendapatkan manfaat dalam mengembangkan ide-ide baru dalam mencari terobosan-terobosan yang bermanfaat dalam pengembangan KPH sebagai upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia. Pembelajaran yang kami ambil adalah Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan KPH. Dengan bekerja sama, berdiskusi dan mendengarkan aspirasi dari berbagai *stakeholder* untuk membangun komitmen semua pihak dalam mengembangkan KPH adalah proses pembelajaran yang sangat penting untuk dilalui.

Cerita ini disampaikan oleh Pak Drasospolino, Direktur KPHP, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Letari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## Cerita 8: Mengawal Pembangunan KPH dari Konsep sampai Implementasi

*Kelompok Penutur: Pemerintah Pusat  
Asal cerita: Jakarta*

**“Perubahan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana FORCLIME memfasilitasi pengembangan KPH sejak dari konsep hingga menjadi rancangan induk dan akhirnya pada tahap pelaksanaannya.”**

Ada banyak perubahan yang terjadi sejak kami bermitra dengan FORCLIME terutama dalam pengembangan sumber daya manusia di pemerintah daerah. Kami berhasil mengembangkan standar kompetensi teknis bidang kehutanan dan standar kompetensi pejabat tinggi. Perubahan lain yang terkait dengan pengembangan dan pendampingan KPH di daerah adalah peningkatan kapasitas para pengelolanya, termasuk pengembangan kompetensi dan sertifikasi Kepala KPH melalui Diklat yang cukup mahal tapi menghasilkan kompetensi yang baik. Pendampingan KPH juga difasilitasi untuk membantu KPH mengembangkan rencana usaha.

Perubahan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana FORCLIME memfasilitasi pengembangan KPH sejak dari konsep hingga menjadi rancangan induk dan akhirnya pada tahap pelaksanaannya.

Cerita ini disampaikan oleh ibu Wikan (Kepala Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Saya kagum pada konsistensi FORCLIME dalam mengawali rancangan induk KPH, mengembangkan sumber daya manusianya, menyusun standar kompetensi sampai kemudian pada uji kompetensinya, serta standarisasinya. Ini adalah sebuah kerja sama yang sangat bagus dan sangat penting karena proses ini memungkinkan hal-hal yang awalnya ada di tataran ide menjadi hasil yang sangat baik.



## Cerita 9: Meningkatkan kepedulian terhadap KPH melalui Publikasi

*Kelompok Penutur: Pemerintah Pusat*

*Asal cerita: Jakarta*

***“Namun yang paling penting bagi saya berkaitan dengan kepedulian terhadap KPH.”***

Dalam konteks pekerjaan saya, GIZ membantu mengisi kesenjangan dalam pekerjaan saya, misalnya ketika saya akan menyusun suatu kebijakan dan untuk itu perlu melakukan serangkaian pertemuan atau diskusi kelompok fokus (FGD) namun saya tidak dapat mengadakan diskusi tersebut atau memberikan informasi, GIZ yang membantu. Kelihatannya seperti sebagian-sebagian, namun dukungan itu tetap bermanfaat bagi kami. Kami berproses bersama - pemerintah dengan APBN - dengan didukung oleh GIZ.

Program GIZ ini telah membawa beberapa perubahan, antara lain dalam hal peningkatan kapasitas. Namun yang paling penting bagi saya adalah meningkatnya kepedulian terhadap KPH. Dengan dukungan GIZ, kami secara rutin mengadakan FGD dengan melibatkan para ahli dan menerbitkan buku-buku. Peran GIZ secara khusus sangat menonjol dan nyata dalam hal penerbitan buku. GIZ tidak hanya mendukung pembiayaan penerbitan buku-buku tersebut namun juga membantu proses penyusunannya, yang kemudian dapat menjadi pembelajaran bagi yang lain. Ada beberapa buku yang telah diterbitkan, antara lain tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), buku tentang KPH, dan tentang peraturan dan perundangan. Selain dalam bentuk buku, publikasi-publikasi tersebut juga diterbitkan daring. Ada 2 buku lagi yang akan terbit yaitu mengenai pembelajaran yang dipetik dari KPH Gularaya.

Dalam proses penyusunan publikasi-publikasi tersebut, dengan bantuan GIZ kami bisa mengundang lebih banyak narasumber atau tenaga ahli, baik dari akademisi, pemerintah daerah, staf KPH dan para pemangku kepentingan lainnya. Berkat publikasi-publikasi ini, perhatian orang terhadap KPH menjadi meningkat. Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri mulai menunjukkan kepeduliannya dan sekarang KPH sudah menjadi direktorat tersendiri.

Cerita ini dituturkan oleh Pak Ali Djajono, Kepala Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, yang sudah terlibat dalam FORCLIME sejak tahun 2010. Pak Ali berperan dalam menyusun kebijakan, regulasi dan sebagainya yang berkaitan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

## Cerita 10: Perubahan Pola Pikir Mengubah Segalanya

*Kelompok Penutur: Pemerintah Propinsi dan Kabupaten*

*Asal cerita: Berau, Kalimantan Timur*

***“Menurut saya, perubahan mindset adalah perubahan yang paling signifikan karena perubahan mindset-lah yang bisa membuat semua perubahan itu terjadi. Kalau orang tidak berubah cara berpikirnya, dia akan sulit berubah.”***

Menurut saya ada perubahan pola pikir dan komitmen Dinas Kehutanan terhadap pentingnya kelembagaan KPH sejak dimulainya program GIZ tahun 2010. Dahulu Dinas Kehutanan bahkan tidak setuju dengan konsep KPH. Kemudian GIZ melakukan upaya pendampingan serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara intensif sehingga mengubah cara pandang dan komitmen Dinas Kehutanan terhadap KPH. Setelah muncul komitmen tersebut, muncul usulan model KPH hingga pembentukan KPH secara kelembagaan.



Cerita ini dicitrakan oleh Pak Hamzah. Sejak tujuh bulan terakhir ini Pak Hamzah duduk sebagai Kepala Seksi Perencanaan Hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala KPH (KKPH) Berau Barat selama tiga tahun. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Seksi Perencanaan Hutan adalah mengembangkan pangkalan data dan mendorong pengembangan KPH.

Perubahan lain yang saya lihat adalah dalam hal membangun pangkalan data, Sebelumnya, Dinas Kehutanan tidak memiliki cukup data. Namun setelah mengumpulkan data dengan membuat peta potensi sosial budaya masyarakat setempat, mereka mengumpulkan data geofisik di lapangan termasuk data spasial. Proses ini membangun kapasitas Dinas Kehutanan dalam pengelolaan dan analisis pangkalan data.

GIZ juga membantu untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Ini membuat kami menyadari bahwa hutan bukan hanya berupa pepohonan. Hutan bisa menghasilkan sesuatu yang lain, salah satunya adalah madu. Saat ini terdapat beberapa permukiman yang melakukan budidaya madu hutan dengan cara panen yang lestari. Upaya pemberdayaan masyarakat ini menghasilkan perubahan.

Saya lihat perusahaan-perusahaan yang didampingi GIZ juga mengalami perubahan sikap terkait sertifikasi. Sekarang sudah ada 2 perusahaan yang secara sukarela berupaya dan berkomitmen untuk mendapatkan sertifikasi *Forest Stewardship Council (FSC)*.

Satu lagi, adalah mengenai penyelesaian konflik pengusahaan lahan hutan. Ada banyak kawasan hutan yang memiliki legalitas hukum dan ijin namun faktanya dikuasai masyarakat dan menimbulkan persoalan. FORCLIME memfasilitasi pengkajian dan pemetaan konflik dengan cara merekrut orang yang bisa melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan mereka melalui beberapa pertemuan sehingga semua pihak bersepakat untuk menyebarkan informasi, mengumpulkan data dan membangun kemitraan. Perubahan dalam penyelesaian konflik ini tidak mudah terjadi karena semula semua pihak saling menyalahkan satu sama lain.

Menurut saya, perubahan cara pandang adalah perubahan yang paling signifikan karena inilah yang bisa membuat semua perubahan lain terjadi. Kalau orang tidak berubah cara berpikirnya, dia akan sulit berubah. Proses komunikasi, penyebaran informasi dan pertemuan yang intensif serta komitmen bersama merupakan faktor-faktor yang berperan terhadap perubahan pola pikir. Dalam proses ini kita harus membuat apa yang kita inginkan masuk dalam logika berpikir mereka agar mereka merasa bahwa ada manfaat bagi mereka.



## **Tema 3.**

### **Integrasi Konservasi dan Pembangunan – Ekonomi Hijau**

FORCLIME membantu pemahaman konsep Ekonomi Hijau di antara para pihak yang relevan. Pengarusutamaan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan merupakan kegiatan utama. FORCLIME mendukung pengembangan kapasitas nilai ekonomi lokal hasil hutan bukan kayu dan mendorong para pihak di daerah dalam pengembangan pemasaran dan strategi investasi.

Kisah perubahan dalam tema ini mendiskusikan penggunaan dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam – dalam hal ini, hutan dan tanaman agroforestri, hasil hutan bukan kayu seperti madu dan hidupan liar – dampak yang dihasilkan terhadap penghidupan masyarakat lokal di wilayah kerja FORCLIME di Kalimantan. Misalnya petani, terlihat memperoleh panen yang lebih baik di kebun agroforestrinya, sementara perwakilan dari pemerintah daerah mencatat peningkatan keterampilan aparat desa dalam menyusun peraturan dan menyiapkan rencana pengelolaan hutan.

FORCLIME dan mitranya menyelenggarakan berbagai sesi pelatihan dan lokakarya, termasuk demonstrasi langsung di lapangan, yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan ini, mulai dari penyadartahuan untuk meningkatkan kinerja hingga praktik-praktik pengelolaan.

Delapan kisah berikut ini menunjukkan bagaimana FORCLIME dan mitra lokalnya di Kalimantan bekerja bersama menuju Ekonomi Hijau.

## Cerita 11: Masyarakat Lebih Memahami Hubungan Madu dan Hutan

*Kelompok Penutur: Anggota dan Pemuka Masyarakat*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

**“Perubahan yang paling bermakna menurut saya adalah peningkatan pengetahuan masyarakat (hubungan hutan dan madu) karena bisa jadi nilai plus bagi masyarakat.”**

GIZ ini kan semacam pendamping yang mendukung kita dalam pengelolaan madu dan hutan desa. GIZ telah terlibat sejak hutan desa ditetapkan tahun 2013. Sebenarnya kita kewalahan tentang maksud dari hak pengelolaan hutan desa itu sendiri. Kawan-kawan dari GIZ bilang kita punya hak untuk mengelola hutan desa selama 35 tahun. Saya pribadi belum mengerti juga soal bagaimana pengelolannya. Pak Ali dari GIZ dan Dinas Kehutanan sudah banyak membantu kami dengan berbagi informasi (sosialisasi) tentang hutan desa dan madu. Berdasarkan SK Bupati ada 5 desa yang masuk dalam pembinaan budidaya madu. Setahu saya, desa saya didampingi oleh GIZ, FFI (Pak Eko) dan Perkumpulan AOI Kaban. Kami juga pernah mendapat pelatihan tentang praktik pemanenan madu secara lestari. Panen lestari itu artinya memanen madu dengan hanya mengambil kepala sarang lebah yang berisi madu. Peralatannya dibantu oleh AOI Kaban. Pendampingan GIZ, sudah cukup bagus namun jarak yang jauh menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi. Saya berharap bahwa saat musim madu nanti, GIZ hadir disini untuk bicara dengan masyarakat seperti apa madu yang baik. Jadi saat kita butuhkan, dia ada disini.

Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini, muncul perubahan diantara masyarakat. Mereka menjadi tahu seperti apa mutu madu yang baik itu, bagaimana memeras madu, serta manfaat dari hutan desa, dan pentingnya hutan desa untuk masa depan kami. Masyarakat sudah mulai menggunakan metode panen lestari, bukan lagi cara panen tradisional seperti dulu. Namun demikian, perubahan masih lambat dalam hal

hutan desa. Hutan desa sering dibicarakan namun respon masyarakat agak lambat. Kami tidak cukup informasi tentang hutan desa, misalnya bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana membangun hutan desa secara semestinya. Masyarakat disini juga masih berpikir bahwa pak kades (kepala desa) sedang menjual danau. Semoga kedepan kita bisa mendiskusikan hal tersebut untuk memberi pemahaman kepada mereka.

Madu dan hutan desa tidak bisa dipisahkan. Saat kita bicara madu, kita tidak bisa lepas untuk membahas hutan desa. Kalau hutan bagus, madu juga bagus. Kalau hutan terbakar, madu susah dicari. Perubahan yang paling bermakna menurut saya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hubungan antara hutan dan madu karena ini bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Kalau masyarakat sudah paham tentang hubungan antara madu dan hutan desa, akan mudah bagi kita untuk bicara tentang manfaat yang bisa mereka petik dari hutan desa.



Cerita ini dicitrakan oleh Pak Supirman yang sudah menjabat Sekretaris Desa Nanga Lauk sejak 2009.

## Cerita 12: Adanya Peraturan Adat Mengambil Madu Tanpa Api atau Asap

*Kelompok Penutur: Pemerintah Propinsi dan Kabupaten*

*Asal cerita: Berau, Kalimantan Timur*

**“...karena selama ini masyarakat hidup dengan beragam mitos pengelolaan madu yang justru merusak kelangsungan pelestarian madu. Namun sekarang ketika cara baru pengelolaan madu menjadi peraturan di salah satu kampung itu menunjukkan masyarakat kampung sudah mengarah ke pelestarian hutan.”**

Saya melihat banyak perubahan di masyarakat ketika GIZ memberikan pelatihan mengenai ekologi budidaya lebah. Perubahan itu adalah awal munculnya perubahan sikap, perilaku dan polapikiryang lebih baik dalam prinsip pelestarian hutan melalui budidaya madu. Sebagai contoh: semula masyarakat biasa memanen madu sekaligus mengambil larva dan anakan lebah, tetapi sekarang masyarakat hanya mengambil

madunya saja untuk tujuan pelestarian. Dulu, masyarakat percaya pada mitos untuk tidak memanen madu pada siang hari karena hasil madunya akan sedikit; sekarang mereka memahami bahwa mengambil madu di siang hari tidak masalah asalkan tidak menggunakan api atau asap. Bahkan ada satu kampung yang membuat aturan larangan memanen madu menggunakan api atau asap. Sebagai hasilnya, produksi madu yang dihasilkan meningkat dari 400 liter per tahun menjadi 750 liter pada bulan Januari 2015.

Menurut saya perubahan yang paling penting adalah perubahan tata cara pengelolaan madu dalam bentuk peraturan baru pemanenan madu di salah satu permukiman. Semula masyarakat menolak mentah-mentah apa yang disampaikan oleh KPH. Saat ini mereka justru membuat aturan baru yang berdasar pada informasi yang diberikan KPH. Bagi saya ini merupakan hal yang penting dan mengejutkan karena selama ini masyarakat hidup dengan beragam mitos pengelolaan madu yang justru merusak kelangsungan madu. Namun sekarang adanya cara baru pengelolaan madu yang dituangkan ke dalam peraturan di salah satu kampung itu menunjukkan bahwa masyarakat kampung tersebut sudah mengarah ke pelestarian hutan. Perubahan ini terjadi berkat upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat melalui pelatihan dan penguatan kelembagaan. Saya melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui cara-cara kultural dengan cara pendekatan kepada individu-individu. Dari cara tersebut kemudian tumbuh kepercayaan dari masyarakat kepada KPH.

Perubahan yang terjadi di masyarakat petani madu hutan tersebut juga berdampak pada diri saya. Saya sekarang meyakini bahwa melestarikan madu berarti melestarikan hutan dan budaya setempat. KPH sendiri juga memetik manfaat dengan adanya pengkajian lengkap tentang pengelolaan hutan yang berdampak positif pada perencanaan program.



Haerudin bekerja di KPH Berau Barat, Berau selama Maret-Juni 2014 dalam rangka Program Bakti Rimbawan. Ia terlibat di FORCLIME dengan membantu KPH melakukan pengkajian untuk melihat potensi madu dan pendampingan petani madu hutan di Kabupaten Berau.

## Cerita 13: Belajar dengan Melihat Langsung Lebih Memotivasi

*Kelompok Penutur: Anggota dan Pemuka Masyarakat*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

**“Sebenarnya kami sudah melakukan agroforestri secara tradisional, kami menanam berbagai tanaman di lahan namun tidak memperhatikan jarak tanam ideal dan kombinasi tanaman dalam satu lahan untuk bisa memberi pertumbuhan yang ideal.”**

Sekitar bulan September 2014, saya dan beberapa teman yang mempunyai keinginan sama untuk memulai menanam kakao mendapatkan bantuan dari GIZ untuk membuat kebun contoh kakao. Sebagai awal, di bulan November, saya dan dua teman lain difasilitasi untuk mengunjungi kebun kakao dan Pusat Penelitian (Puslit) kakao di Jember dan Bali untuk belajar budidaya kakao, untuk nantinya dapat mentransfer ilmu ke teman-teman di desa. Di Bali, kami dapat melihat langsung kebun kakao dan belajar langsung dengan petani kakao tentang bagaimana merawat kakao. Kami langsung turun ke kebun sungguhan, bukan di ruangan. Kalau hanya di dalam ruangan tidak akan ada gunanya. Sementara itu di Jember kami melihat keseluruhan proses mulai dari persemaian sampai dengan pengolahan kakao. Kami juga bisa mencicipi kakao yang dibuat langsung disana. Ilmunya menjadi mudah diserap dengan cara ini.

Pada bulan Desember 2014, kami mendapatkan bantuan bibit unggul kakao dari GIZ yang didatangkan dari Jember. Setelah itu staf GIZ memberikan pendampingan mulai dari proses persemaian. Sekitar Februari-Maret, kami mulai menanam bibit kakao tersebut. Staf GIZ tetap memberikan dampingan dan juga membantu bila ada yang kurang. Kami juga diberi materi-materi bacaan. Kami didampingi hingga sampai di kebun, tidak hanya di rumah, termasuk cara membuat kompos dari bahan-bahan di sekitar kami. Dalam proses pendampingan ini, kami diajarkan tentang konsep agroforestri.

Sebenarnya kami sudah melakukan agroforestri secara tradisional; kami menanam berbagai tanaman di lahan namun tidak memperhatikan jarak tanam ideal dan kombinasi tanaman dalam satu lahan untuk bisa mendorong pertumbuhan yang ideal.

Mulai saat persemaian, banyak orang yang mulai tertarik dan bertanya kepada saya dari mana bisa mendapatkan bibit tersebut. Adanya demplot ini bisa menggerakkan masyarakat. Banyak sekali yang ingin bergabung.

Namun bagi saya, perubahan pola pikir setelah kunjungan ke Jember dan Bali merupakan perubahan yang paling penting karena memberikan motivasi bahwa kami bisa melakukan hal yang sama. Tanpa melihat langsung, akan sulit mengharapkan orang berubah. Kalau kunjungan hanya di dalam gedung itu tidak akan berguna. Kunjungan-kunjungan tersebut membuka pikiran bahwa tanaman kakao bisa memberikan hasil. Kalau kita punya tanah, mengapa kita tidak bisa mengelola secara intensif?



Cerita ini dituturkan oleh pak Petrus Derani, seorang petani yang menjadi salah satu anggota tim agroforestri. Cerita ini memotret perubahan yang dialami oleh pak Petrus Derani setelah mengikuti kegiatan kebun contoh untuk tanaman kakao yang dimulai sejak September 2014.

## Cerita 14: Cara Baru Merawat Lahan

*Kelompok Penutur: Anggota dan Pemuka Masyarakat*

*Asal cerita: Malinau, Kalimantan Utara*

**“Bagi saya, peningkatan hasil produksi tanaman merupakan perubahan yang paling signifikan karena dengan peningkatan produksi ini saya bisa memenuhi permintaan pasar. Dalam hal pemasaran, saya merasa terbantu juga oleh GIZ. GIZ membantu menghubungkan saya dengan beberapa perusahaan coklat.”**

Pertama-tama, sekarang saya menggunakan cara yang berbeda untuk membasmi hama. Dulu saya menggunakan bahan kimia untuk mematikan rumput agar tidak tumbuh. Sekarang saya menggunakan mesin pemotong rumput sehingga tanaman tidak terkena dampak negatif dari bahan kimia yang digunakan. Sejak itu saya tidak terpengaruh dengan berbagai tawaran pupuk dan bahan kimia lain untuk input lahan pertanian saya.



Ini adalah cerita dari pak Mikha Yusup. pak Mikha adalah petani kakao di Kabupaten Malinau. Kegiatan berkebun kakao sudah lama dilakukan oleh pak Mikha tetapi baru secara intensif dilakukan semenjak pak Mika pensiun dari Bappeda Kabupaten Malinau.

Saya ingin mencoba cara baru yang diajarkan GIZ karena menurut saya cara itu masuk akal, misalnya dengan mananam tanaman penutup lahan agar lahan tidak keras dan gersang. Saya kemudian menanam kacang koro. Hasilnya tanaman kakao tumbuh lebih subur karena daun koro jatuh ke tanah dan menyuburkannya. GIZ menerapkan pola pertanian tradisional yang mengutamakan konservasi tanah. Dengan begitu saya juga tidak perlu lagi susah-susah harus memotong tanaman yang sudah rimbun daunnya.

Dengan adanya tanaman naungan, daun-daun kakao tetap hijau. Dulu, daun-daun cepat menjadi kuning dan kering karena tidak ada tanaman pelindung. Saya tetap melakukan perawatan pada tanaman penaung dengan cara memangkasnya apabila sudah terlalu lebat agar pohon kakao tidak berada dalam lingkungan yang terlalu lembab. Hal ini mempengaruhi hasil produksi. Kalau dulu misalnya sekali panen saya menghasilkan 20 kilogram, sekarang saya menghasilkan kurang lebih 60 kilogram kakao kering per minggu.

Sebelum diajari oleh GIZ, saya tidak menanam buah-buahan sebagai tanaman penaung. Saya hanya fokus pada tanaman Kakao. Sekarang dengan menanam jenis tanaman lain yang menghasilkan seperti buah-buahan, peningkatan saya meningkat dan pola konsumsi saya berubah. Dulu saya harus membeli buah-buahan tapi sekarang saya dapat mengambil buah dari kebun sendiri. Sebetulnya, tidak ada cara baru untuk menanam kakao menurut saya, namun ada cara baru dalam merawat lahan yang berdampak pada kesuburan tanah.

Bagi saya, peningkatan hasil produksi tanaman merupakan perubahan yang paling signifikan karena dengan peningkatan produksi ini saya bisa memenuhi permintaan pasar. Dalam hal pemasaran, saya merasa terbantu juga oleh GIZ. GIZ membantu menghubungkan saya dengan beberapa perusahaan coklat dari Bali, Jawa, Sumatera dan Lampung. Sebuah perusahaan coklat dari Sumatera, misalnya, memesan biji coklat fermentasi sebanyak 200 kilogram dengan harga Rp 45.000 per kilogram, sementara biasanya pembeli lain membeli biji kakao non fermentasi dengan harga Rp25.000 per kilogram. Ini membuat saya termotivasi untuk lebih serius menanam kakao.

## Cerita 15: Masyarakat Berubah

*Kelompok Penutur: Pemerintah Propinsi dan Kabupaten*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

**"Perilaku masyarakat berubah, contohnya mereka lepas jerat yang ada hutan yang dipakai untuk menangkap hewan. Bagi saya inilah perubahan yang paling bermakna karena ini memang tujuan yang ingin kita capai menjaga keanekaragaman hutan."**

Yang saya ketahui tentang kegiatan GIZ itu adalah mereka bekerja menangani persoalan tata batas dan tata guna lahan. Sekitar 8 bulan lalu (Januari), mereka melakukan inventarisasi karbon untuk menghitung potensi karbon. Ada juga pelatihan-pelatihan, contohnya yang baru-baru ini dilakukan GIZ yaitu pelatihan tentang penggunaan Metode 6S. Saya pribadi banyak mendapatkan pengalaman tentang kehutanan di lapangan, seperti cara mengambil data di lapangan untuk dijadikan peta.

Ada juga pelatihan untuk pengembangan kapasitas KPH. Terus terang, tahun lalu KPH tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada GIZ. Tahun lalu dana KPH sangat kecil. Banyak kegiatan KPH di lapangan yang didukung oleh GIZ dan *District Programme Management Unit* (DPMU), karena rancangan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH belum disahkan, sehingga KPH belum bisa melaksanakan program kerjanya. Contohnya, GIZ membantu dalam menetapkan tata batas kawasan hutan. Secara tidak langsung GIZ membantu KPH karena data yang telah diambil dapat kami gunakan juga di KPH. Dukungan GIZ diberikan dalam bentuk dana dan bantuan teknis.

Awal tahun ini, GIZ juga membantu kami dalam kegiatan pelatihan perencanaan konservasi partisipatif, yang juga melibatkan masyarakat. Disini kami mempelajari hewan, tanaman apa saja yang ada di hutan dan apa penyebab berkurangnya jumlah hewan atau tanaman tertentu dan apa yang harus dilakukan. Setelah pelatihan ini, perilaku masyarakat berubah, contohnya mereka melepas jerat yang mereka pasang di hutan untuk menangkap hewan. Bagi saya inilah perubahan yang paling bermakna karena ini memang tujuan yang ingin kita capai yaitu menjaga keanekaragaman hutan.



Cerita ini dicitrakan oleh pak Kasmin. Pak Kasmin adalah staf bidang konservasi di KPH, yang berkantor di Mataso. Pak Kasmin mulai bekerja di KPH sejak Maret 2014.

## Cerita 16: Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Pengelola Hutan

*Kelompok Penutur: Anggota dan Pemuka Masyarakat*

*Asal cerita: Malinau, Kalimantan Utara*

**“Perubahan signifikan yang terjadi menurut saya adalah peningkatan kapasitas aparat desa, khususnya Badan Pengelola Hutan Desa, misalnya: kemampuan menyusun rencana kerja dengan proses menggali potensi desa.”**

Saya melihat ada sejumlah perubahan yang terjadi dengan adanya FORCLIME. Pertama, saat ini Badan Pengelola Hutan Desa (BPHD) sudah lebih fokus menjalankan perannya setelah ada pengurangan personil kepengurusan. Kedua, penetapan SK Hutan Desa telah memperkuat status hutan desa karena sekarang ada legalitas. Kami tidak takut lagi akan ada orang yang mengganggu karena kami sudah punya payung hukum dari kementerian. Kami dulu takut jika ada campur tangan dari pemerintah pusat, karena meski Setulang adalah hutan adat, pusat tidak punya data mengenai hal tersebut. Misalnya, jika ada pihak yang mau membuka tambang disini, pemerintah pusat akan menyetujui karena mereka tidak tahu Setulang punya hutan adat. Ketiga, ada peningkatan kapasitas aparat desa, khususnya BPHD.

Perubahan yang paling signifikan terjadi menurut saya adalah meningkatnya kapasitas aparat desa, khususnya BPHD. Mereka, misalnya, sekarang mampu untuk menyusun rencana kerja dan menggali potensi desa. Kapasitas BPHD juga telah membaik sejak ada pembentukan pengurus baru di tahun 2013.

Dulu pengurus BPHD banyak jumlahnya dan beberapajuga merupakan aparat desa. Sekarang, pengurus BPHD lebih fokus untuk mengelola hutan. Sebelum ada kegiatan FORCLIME, saya melihat aparat desa tidak memiliki kemampuan untuk menyusun rencana kerja. Walaupun Desa Setulang sudah memiliki rancangan

tentang fungsi kawasan hutan desa dan juga rancangan peraturan tentang pengurus BPHD, rancangan-rancangan tersebut tidak pernah dijalankan karena kesibukan mereka. Kemudian kami mendapat konsultan pendamping yang didatangkan oleh FORCLIME. BPHD fokus kembali menyusun rancangan fungsi kawasan hutan dan peraturan desa. Mereka bahkan mengadakan pertemuan-pertemuan sampai malam hari. Setelah mengikuti pelatihan-pelatihan, digunakan pendekatan yang berbeda untuk mengatasi masalah di desa. Misalnya, kalau dulu masalah diatasi dengan pengerahan massa karena tidak ada payung hukum yang kuat (misalnya dengan melakukan demonstrasi di luar kantor perusahaan), sekarang tidak lagi.

Peningkatan aparat desa, khususnya BPHD ini penting menurut saya karena membuat pengurus mampu mengatasi masalah di seputar hutan desa.



Cerita ini dicitrakan oleh pak Saleh, Kepala Desa Setulang, Kecamatan Malinau Ilir Selatan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Pak Saleh telah menjadi kepala desa sejak tahun 2011. Pak Saleh telah mengikuti kegiatan-kegiatan FORCLIME sejak proses pengkajian dan diskusi hutan desa, pelatihan sampai proses mempersiapkan berkas untuk pengajuan Surat Keputusan (SK) Hutan Desa

## Tema 4.

### Pengembangan Kapasitas SDM untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

Di tingkat nasional dan sub nasional, FORCLIME menyediakan dukungan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengurangan emisi di sektor kehutanan. Pendampingan program FORCLIME diarahkan pada:

- (1) Pengembangan kebijakan terkait dengan kapasitas sumber daya manusia bidang kehutanan;
- (2) Penguatan kapasitas manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan pemerintah (khususnya Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan - Pusdiklat Kehutanan - di Bogor); dan
- (3) Pengembangan pelatihan yang terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan.

Kisah berikut ini menggambarkan beberapa perubahan yang dialami oleh mitra FORCLIME yang ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan di Bogor, dan di sekolah-sekolah kejuruan Kehutanan. Perubahan positif yang terjadi termasuk mengadopsi metoda *e-learning* dan kompetensi yang lebih besar dari pengajar dan pelatih. Perilaku diantara murid sekolah kejuruan sekarang berubah, sementara lembaga pelatihan menikmati hasil yang lebih baik.



## Cerita 17: Perubahan Paradigma dalam Metode Belajar

*Kelompok Penutur: Pusat Pendidikan dan  
Pelatihan Kehutanan*

*Asal cerita: Bogor*

**“Perubahan yang paling bermakna buat saya adalah perubahan paradigma belajar dari metode konvensional menjadi *e-learning*. Ternyata itu adalah sebuah proses tersendiri.”**

Perubahan yang paling bermakna buat saya adalah perubahan paradigma belajar dari metode konvensional menjadi *e-learning*. Ternyata itu adalah sebuah proses tersendiri. Mengembangkan sistem, kapasitas, serta fasilitas itu penting, namun tidak akan terjadi perubahan yang berarti jika tidak ada perubahan paradigma belajar dari orang-orang yang terlibat dalam merancang dan melakukan Diklat tersebut.



Cerita ini dituturkan oleh pak Erfan (Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan *e-learning*, Pusdiklat Kehutanan Bogor) dan pak Suherdi (tim *e-learning*, Pusdiklat Kehutanan Bogor). Karena keduanya mempunyai cerita yang sama tentang perubahan yang paling penting, penulis membuatnya menjadi satu cerita.

Melalui kerja sama dengan FORCLIME, perubahan paradigma itu mulai terjadi di dalam dan di luar Pusdiklat Kehutanan. Kami sudah memiliki satu sistem manajemen pembelajaran. Bersamaan dengan terbukanya wawasan kami tentang *e-learning*, kami berhasil membuat modul *e-learning* menggunakan perangkat lunak yang diperkenalkan oleh GIZ. Saat ini, instansi-instansi lain seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perhutani dan KPK pun tertarik untuk melakukan *e-learning* dengan serius. Hal ini sangat menggembirakan karena *e-learning* baru kami kembangkan beberapa tahun belakangan.

Perubahan paradigma tersebut kemudian menghasilkan perubahan-perubahan lainnya terjadi, termasuk perubahan kebijakan. Meskipun masih dalam proses, dan kami belum punya kebijakan yang lebih tinggi di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara internal kami sudah punya bidang perencanaan evaluasi dan pengembangan *e-learning*. Ini artinya *e-learning* sudah masuk dalam nomenklatur kami dan oleh karena itu menjadi keharusan untuk dilaksanakan.

Ada juga perubahan-perubahan lain yang menurut saya juga perlu dicatat seperti terbukanya pemahaman kami tentang produk-produk komunikasi, bagaimana membuat bahan tayang *PowerPoint*, dan membuat metode belajar yang menyenangkan. Rapat-rapat pada saat ini juga sudah diselenggarakan dengan cara yang tidak konvensional lagi. Para pengajar yang senior sudah terlibat dalam *e-learning* dan tidak lagi kaku dengan hanya mengacu pada metode-metode pengajaran konvensional.

Sekarang kami juga sudah mempunyai portal *e-learning* di [www.pusdiklathut.org](http://www.pusdiklathut.org). Tim *e-learning* sendiri sudah ada, dan para instruktur kami sudah mampu membuat modul elektronik.

## Cerita 18: Akselerasi Kinerja Pusdiklat Kehutanan

*Kelompok Penutur: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan*

*Asal cerita: Bogor*

**“Dengan e-learning pelaksanaan Diklat menjadi sangat efisien. Ini penting karena memungkinkan tercapainya target RPJMN yang awalnya kami anggap ambisius itu.”**

Perubahan yang paling penting dari kemitraan dengan FORCLIME adalah percepatan kinerja Pusdiklat Kehutanan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan peningkatan tiga kali lipat dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang harus dilakukan pusdiklat dibandingkan periode sebelumnya. Target ini cukup ambisius karena pada saat yang sama tidak ada penambahan sarana dan prasarana yang signifikan yang kami dapatkan.

Sementara itu, tidak lama sebelumnya, sejak akhir tahun 2014 ada banyak hal yang kami lakukan bersama FORCLIME untuk *e-learning*. Dimulai dengan perencanaan yang terstruktur atau sebuah peta jalan, kami telah mengembangkan sistem dan fasilitas kediklatan serta membangun kapasitas para pengajar, pengelola, dan pengambil keputusan. GIZ telah memberikan bantuan teknis berupa tenaga ahli dan komunikasi telah terjalin dengan erat dan intens diantara kami.

Sekarang, saya sudah melihat bagaimana akselerasi kinerja pusdiklat terjadi karena *e-learning*. Dalam satu angkatan pelaksanaan *e-learning*, kami mampu menghasilkan lulusan sebanyak 822 orang. Jumlah ini jauh lebih tinggi daripada Diklat konvensional berbasis ruang kelas yang selama ini kami lakukan. Dengan *e-learning* pelaksanaan Diklat menjadi sangat efisien. Ini penting karena memungkinkan tercapainya target RPJMN yang awalnya kami anggap ambisius itu.

Ada perubahan-perubahan lain yang saya amati terkait dengan kemitraan bersama FORCLIME. Fasilitas dan pemanfaatan konferensi video mulai berkembang. Saya tidak lagi harus hadir secara fisik saat membuka atau menutup pertemuan atau Diklat. Selain itu penerapan *e-learning* di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan siswa SMK Kehutanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun ini sempat membuat kami mendapatkan kritik, ini merupakan hal yang membanggakan kami. Perubahan cara pandang juga mulai terjadi di kalangan pengajar atau widyaiswara yang awalnya menunjukkan resistensi terhadap *e-learning*; mereka sekarang telah menerima cara belajar dan mengajar yang berbeda dari yang konvensional.



Cerita ini dicitrakan oleh pak Agus Justianto, mitra strategis FORCLIME yang sebelumnya (sekitar empat minggu sebelum cerita ini dikumpulkan) menjabat sebagai Kepala Pusat Diklat Kehutanan (*Center for Forestry Education and Training/CFET*) Bogor selama kurang lebih 4 tahun. Cerita ini memotret perubahan yang diamati oleh pak Agus Justianto pada saat menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Kehutanan, dengan fokus pada *e-learning*.

## Cerita 19: Penambahan Jumlah SMK Binaan dengan Standar dan Kompetensi yang Sama

*Kelompok Penutur: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan*

*Asal cerita: Bogor*

**“Kompetensi guru-guru di semua SMK tersebut dapat ditingkatkan. Dulu kami tidak mempunyai perencanaan untuk pengembangan SMK, sekarang kami punya road map pengembangan SMK.”**

Awalnya ada 5 SMK di bawah binaan Pusdiklat Kehutanan Bogor. Sejak GIZ membantu, kami mampu membina 20 SMK dalam kurun waktu dua tahun. Ini signifikan sekali menurut saya. Mengapa? Dukungan itu penting sekali dalam membina 15 SMK yang lain. Anggaran kami sangat terbatas tetapi dengan dukungan GIZ, kompetensi guru-guru di semua SMK tersebut dapat ditingkatkan. Dulu kami tidak mempunyai perencanaan untuk pengembangan SMK, sekarang kami punya peta jalan untuk pengembangan SMK.

Dengan dukungan itu pula kami dapat mengembangkan standar uji kompetensi bagi peserta didik. Bisa dibayangkan bagaimana

kemajuan yang telah dicapai karena pada awalnya sekolah-sekolah tersebut tidak punya modul, kurikulum dan bahan ajar. Guru-guru juga punya keterbatasan dalam pengetahuan kehutanan dan keterampilan mengajar. Semua sekolah jalan sendiri-sendiri tanpa standar yang sama.

Sekarang kami sudah punya 4 paket keahlian: Pengukuran dan Pemetaan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Teknik Produksi Hasil Hutan, dan Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan.

Dengan peningkatan jumlah SMK dan kompetensi lulusannya, lulusan SMK binaan kami sekarang banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan swasta dan instansi pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perum Perhutani, Sinar Mas serta KPH. Sebelum adanya kompetensi SMK Kehutanan, lulusan-lulusannya sulit mendapatkan pekerjaan. Saya sering sekali mendapatkan cerita bagaimana para lulusan dan orang tuanya sangat berterimakasih karena pekerjaan yang mereka (atau anak mereka) dapatkan tidak lama setelah lulus.

Sekolah-sekolah tertentu yang awalnya nyaris ditutup karena kekurangan anak didik kemudian berkembang dan bertambah jumlah anak didiknya secara signifikan. Semua SMK yang telah dibina kini mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan minat calon anak didik untuk sekolah di SMK tersebut makin meningkat.

Kami juga mengamati perubahan perilaku pada para orang tua dari peserta didik kami. Di Nusa Tenggara Barat ada perubahan perilaku para orang tua yang sebelumnya melakukan penebangan kayu secara ilegal, mereka tidak lagi meneruskan perilaku tersebut saat ini. Di Tuban dan Mojokerto para orang tua yang merambah hutan sekarang sudah memahami tentang konservasi. Di Rangkasbitung, beberapa orang tua yang sebelumnya terlibat dalam penambangan ilegal tidak lagi meneruskan perilaku tersebut.



Cerita ini dituturkan oleh Bu Rita dari Pusdiklat Kehutanan Bogor.

## Cerita 20: Peningkatan Minat Calon Siswa Baru dan Orang Tua untuk Sekolah di SMK Kehutanan

*Kelompok Penutur: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan*

*Asal cerita: Across Indonesia*

**“Semua perubahan diatas menyebabkan perubahan yang menurut kami paling penting: peningkatan minat calon siswa baru serta kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di SMK Kehutanan.”**

Sebelum kami mendapat dukungan dan binaan dari Pusdiklat Kehutanan dan FORCLIME, kami tidak punya bahan ajar sama sekali. Kami harus cari dan buat sendiri apa adanya sehingga masing-masing SMK Kehutanan mempunyai bahan ajar yang berbeda satu sama lain. Guru-guru SMK jarang sekali mendapat pengembangan kapasitas, paling-paling satu kali dalam lima tahun. Dalam kondisi demikian, kami hanya memiliki sedikit anak didik.

Sekarang, kami sudah punya bahan ajar dalam bentuk modul-modul yang lengkap dan bermutu. Guru-guru sangat dibantu dengan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas yang intensif. Dalam satu tahun, mereka bisa mendapat kesempatan mengikuti Diklat hingga enam kali. Ini membuat kualitas belajar dan mengajar meningkat. Dengan dukungan Pusdiklat pula, banyak lulusan kami yang bisa langsung bekerja karena dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan atau instansi yang membutuhkan lulusan SMK Kehutanan.

Dari semua perubahan di atas, yang menurut kami paling penting adalah meningkatnya minat calon anak didik baru serta kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di SMK Kehutanan. Bagi saya ini merupakan perubahan yang paling penting karena dulu kondisi sekolah kami sangat memprihatinkan dengan jumlah anak didik yang sangat sedikit. Sekarang, kami bahkan harus membatasi jumlah anak didik yang diterima untuk tetap menjaga kualitas lulusan sekolah kami.



Cerita ini dituturkan oleh para kepala sekolah dari 18 SMK Kehutanan dari berbagai tempat di Indonesia dalam sebuah diskusi yang dilakukan pada saat Jambore SMK Kehutanan di Cibodas. Tulisan yang diangkat berangkat dari cerita yang paling banyak muncul dan disepakati sebagai perubahan yang paling penting oleh para kepala sekolah.

## Cerita 21: Perubahan Sikap Peserta Didik: Berani Bermimpi

*Kelompok Penutur: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan*

*Asal cerita: Bogor*

**“Perubahan yang paling penting menurut saya adalah perubahan sikap siswa-siswa kami. Dulu mereka asal sekolah saja. Yang penting lulus, selesai SMK.”**

Sejak saya mendapat banyak penguatan kapasitas melalui Pusklat Kehutanan, banyak perubahan yang bisa dibilang tidak terduga telah terjadi. Ada seorang kepala sekolah di Bogor yang rela menjadi guru di sekolah saya karena tertarik dan ingin belajar banyak hal yang saya terapkan di sekolah.

Selain itu, pada umumnya SMK di Bogor – terutama SMK teknik yang sangat terkenal – sering terlibat dalam perkelahian masal (tawuran), namun banyak orang heran karena anak didik sekolah kami tidak terlibat tawuran. Anak didik kami energinya terserap untuk berbagai kegiatan belajar dan praktek.

Dari banyak perubahan positif yang terjadi, perubahan yang paling penting menurut saya adalah perubahan sikap anak didik kami. Dulu mereka asal sekolah saja dan beranggapan bahwa yang penting lulus dan selesai SMK.

Dengan pembinaan, kompetensi, serta jaringan dengan dunia kerja yang sekarang bisa kami tawarkan, banyak anak didik yang sekarang ingin lanjut kuliah.

Ini penting karena sekolah berhasil mendorong perubahan sikap para anak didik yang tadinya tidak ada harapan dan tidak berpikir mampu mengubah hidupnya menjadi berani mengejar impian yang lebih tinggi.

Cerita ini dituturkan oleh pak Juan Rachman, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Bakti Rimba Bahari Kota Bogor dalam sebuah diskusi yang dilakukan pada saat Jambore SMK Kehutanan di Cibodas.



## Tema 5.

### Perbaikan Tata Kelola Hutan Melalui Penyelesaian Konflik dan Pemetaan Partisipatif

FORCLIME telah mendukung pemetaan partisipatif di beberapa desa di Kalimantan sejak 2010. Di wilayah kerja FORCLIME, dimana kebanyakan masyarakatnya bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi penghidupannya, kepemilikan lahan yang pasti dan jelas merupakan dasar untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan selain juga untuk konservasi hutan. Namun, karena kurangnya tata kelola hutan dan lahan yang baik, seringkali kepemilikan lahan menjadi tidak jelas. Skema-skema pengelolaan berbasis masyarakat dapat memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan hak akses untuk mengelola hutan dan menangani konflik yang ada, seperti tumpang tindih kepemilikan lahan. GIZ telah bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman, seperti *Working Group on Forest-Land Tenure (WGT)*, untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan melalui mediasi penanganan konflik antara masyarakat dan perusahaan kayu.

Kisah berikut ini memperlihatkan bagaimana pengetahuan mengenai batas desa dan hutan, potensi penggunaan lahan, dan dinamika penanganan konflik dapat mengubah kehidupan masyarakat desa di Kalimantan.

## Cerita 22: Pentingnya Mediasi Pihak Ketiga

*Kelompok Penutur: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

**“...masyarakat tidak hanya mengetahui tentang batas desa tapi juga mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada di dalam desa mereka. Mereka juga mengetahui tata ruang desa mereka.”**

Saya tahu sedikit tentang kegiatan GIZ, seperti pemetaan partisipatif dimana masyarakat diajarkan menggunakan GPS untuk memetakan wilayah mereka. Kemudian ada juga mikrohidro di Sadap tetapi gagal karena kebanjiran. GIZ juga memprakarsai hutan desa. GIZ juga mempromosikan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Walau mungkin belum sempat ada pelatihan di masyarakat, prakarsanya telah dimulai. Terakhir yang saya

tahu, GIZ mendorong terbentuknya KPH Kapuas Hulu yang juga bekerja di salah satu ketemenggungan kami. Staf GIZ juga terlibat dalam forum-forum yang menyangkut isu kehutanan.

Saya tidak terlibat langsung dalam pemetaan tapi anggota Sebatopa yang berada di ketemenggungan banyak terlibat. Melalui proses pemetaan partisipatif ini, masyarakat tidak hanya mengetahui tentang batas desa tapi juga mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada di dalam desa mereka. Mereka juga mengetahui pemanfaatan tata ruang desa mereka. Dengan adanya peta desa, mereka juga menjadi mampu untuk memutuskan lokasi mana yang akan dibuka kepada pihak luar. Sepengetahuan saya seperti itu. Hanya saja masyarakat belum memahami bagaimana memanfaatkan lahan dengan efektif sehingga pengetahuan itu belum dipraktikkan.

Keberadaan KPH juga masih belum terlalu dirasakan perannya. Sepengetahuan saya, program KPH bagus dan program ini fokus



pada pemberdayaan masyarakat dan HHBK. Peran GIZ untuk mendorong pengembangan HHBK masih belum nampak mungkin karena mereka masih fokus untuk memperkuat KPH. Namun memang tidak ada staf GIZ yang khusus menangani HHBK dan staf GIZ juga tidak banyak. Paling-paling ada Thilde (staf GIZ di Putussibau). Kalau pak Ismet hanya bekerja beberapa minggu kemudian sudah harus keluar kota Putussibau karena tanggung jawab lainnya. Kadang-kadang tenaga ahli Jerman didatangkan. Sebenarnya fokus pada pengembangan HHBK saja akan bermanfaat untuk semua masyarakat dan semua orang pasti mau terlibat.

Kesulitan muncul pada saat pemetaan partisipatif di Pulau Manak dan Menua Sadap. Sebenarnya peta sudah selesai dan prosesnya bagus karena melibatkan semua komponen masyarakat. Namun demikian, karena mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu, peta tersebut belum ditandatangani meskipun

sudah selesai dibuat oleh GIZ. Sengketa antara Pulau Manak dan Menua Sadap sudah lama berlangsung. Sudah banyak yang mencoba memediasi, termasuk saya. Baru-baru ini Working Group Tenur (WGT) juga ikut terlibat. Saya beberapa kali diundang tapi tidak bisa hadir. Setahu saya belum ada perubahan dari proses mediasi yang dilakukan WGT.<sup>2</sup>

Namun, bagi saya kehadiran WGT dalam proses mediasi ini adalah suatu perubahan yang sangat penting karena masyarakat mengerti dan menyadari bagaimana proses resolusi konflik berlangsung. Mereka jadi tahu apa yang harus dilakukan kalau ada konflik. Kita ini tidak bisa lepas dari konflik; konflik dengan perusahaan, konflik dengan taman nasional, dan siapa tahu ada konflik dengan LSM lain dan KPH. Hanya saja saya berharap WGT lebih intens dan lebih metodis dalam memfasilitasi masyarakat. Mereka bisa tinggal di Putussibau, tidak hanya datang untuk beberapa hari lalu pergi lagi.



Cerita ini dicitrakan oleh pak Stepanus. Pak Stepanus adalah pendiri Sebatopa. Sebatopa adalah organisasi kemasyarakatan yang memanyungi 5 ketemenggungan di wilayah Kapuas Hulu. Sebatopa dibentuk pada tahun 2011 untuk menjembatani masyarakat dan Taman Nasional Betung Kerihun.

<sup>2</sup> Info terkini: pada bulan Maret 2016, kedua desa Pulau Manak dan Menua Sadap akhirnya mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama dan mereka setuju dengan batas administrasi wilayah kedua desa. Mediasi difasilitasi oleh *Working Group Tenure* dan didukung oleh GIZ.



## Cerita 23: Pemetaan Kunci Melihat Potensi Desa

*Kelompok Penutur: Anggota dan Pemuka Masyarakat*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

***“Bila tidak dibantu oleh pihak luar, saya pikir masalah tidak akan bisa diselesaikan dengan baik. Saya belajar bagaimana menyelesaikan konflik, apa yang harus dilakukan.”***

Kegiatan-kegiatan GIZ yang pernah saya ikuti adalah pemetaan dan pertemuan-pertemuan sosialisasi. Pemetaan yang dilakukan GIZ berbeda dengan pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau dengan GIZ, kami yaitu masyarakat langsung diajak terjun ke lokasi sehingga kami langsung dapat memberikan nama saat tiba di satu tempat. Pemerintah hanya mengira-ngira sehingga sering menimbulkan sengketa tentang tanda batas. Jadi akan ada perbedaan antara peta yang dilakukan masyarakat sendiri bersama GIZ dengan peta dari pemerintah. Selama kegiatan ini, kami belajar menggunakan Sistem Pemosisi Global (*Global Positioning System/ GPS*) dan cara membuat peta. Sebelum ini saya tidak tahu bagaimana cara membaca peta.

Setelah ikut kegiatan ini saya bisa membaca peta, misalnya saya jadi bisa melihat mana daerah pegunungan.

Peta ini sendiri belum disahkan karena masih ada masalah tata batas antara Suku Iban dan Suku Embaloh. Saat ini yang paling berat adalah menyelesaikan konflik antara kedua suku ini karena batas desa yang ditetapkan Suku Iban tidak sama dengan Suku Embaloh. Bila tidak dibantu oleh pihak luar, saya pikir masalah tidak akan bisa diselesaikan dengan baik. Saya belajar bagaimana menyelesaikan konflik, apa yang harus dilakukan.

Bagi saya, yang paling bermakna adalah keikutsertaan dalam kegiatan pemetaan karena kami menjadi tahu persis dimana batas desa dengan langsung ke lokasi bukan hanya dengan melihat peta. Kami tahu luas wilayah kita dan apa yang ada di daerah kami sehingga kami tahu bagaimana cara mengelola dan memanfaatkannya.

Cerita ini dituturkan oleh pak B. Kosmas. Pak Kosmas adalah Ketua Adat Desa Pulau Manak. Pak Kosmas terlibat dalam kegiatan pemetaan partisipatif dan penyelesaian masalah tata batas antara Pulau Manak dan Menua Sadap.



## Cerita 24: Membaca Karakter Masyarakat Mencegah Konflik

*Kelompok Penutur: Anggota dan Pemuka Masyarakat*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

**“Bagi saya, perubahan pengetahuan tentang bagaimana membaca karakter antar suku, antar desa paling bermakna karena bila kita tidak mengenal karakter orang maka masalah bisa menjadi sumber konflik.”**

Sebagai staf desa, saya ikut terlibat dalam kegiatan pemetaan yang dilakukan GIZ pada tahun 2009-2010. Selama kegiatan ini, saya belajar tentang pemetaan, batas antar desa dan tata ruang. Saya belajar tentang pemetaan, mengenal tata batas, mengenal tata ruang, mengenal wilayah sendiri. Saya bisa mengenali dimana aset-aset dusun saya.



Berkat pengetahuan tersebut, saat menjadi kepala dusun saya sudah mempunyai sedikit pengalaman tentang pemetaan dan identifikasi pemanfaatan ruang serta tata batas. Dengan begitu saya bisa memberikan masukan kepada masyarakat yang belum mengenal tentang tata ruang dan tata batas. Ini penting agar kami tahu batas desa kami dengan desa tetangga, supaya kami tahu dimana letak kebun masyarakat, kuburan, jalan, hutan atau habitat yang harus dilindungi. Sebelum mengikuti kegiatan ini, saya belum tahu sama sekali mengenai hal ini. Namun, sampai saat ini masih ada tata batas yang belum selesai karena masih belum tercapai kesepakatan karena alasan suku.

Selain kegiatan pemetaan tersebut, saya juga ikut kegiatan pelatihan tentang penyelesaian masalah tata batas tersebut yang dilakukan oleh *Working Group Tenure* (WGT). Saya belajar tentang karakter antar desa dan manusianya. Saya tahu bahwa orang-orang bisa diajak untuk kompromi dan bahwa orang-orang juga ingin maju. Ini penting karena bila kita tidak mengenal karakter antar desa dan manusia di desa tersebut, bila ada masalah kita tidak bisa mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan masalah.

Bagi saya, perubahan pengetahuan tentang bagaimana membaca karakter antar suku antar desa merupakan perubahan yang paling penting karena bila kita tidak mengenal karakter orang, satu masalah bisa menjadi sumber konflik. Bila kita tidak tahu karakter orang dan kita memaksa mereka, konflik antar desa bisa timbul.

Cerita ini dituturkan oleh pak Agustinus Unan. Pak Unan adalah Kepala Dusun Pinjauan Desa Pulau Manak. Sebelum ini beliau adalah staf desa selama lebih tujuh tahun. Pak Unan terlibat dalam kegiatan pemetaan partisipatif di tahun 2009/2010 dan dalam penyelesaian konflik tata batas antara Desa Menua Sadap dan Pulau Manak (2014/2015).

## Tema 6. Gender

Kesuksesan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan ditentukan oleh partisipasi para pihak. Laki-laki dan perempuan seringkali mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam pengelolaan hutan. Akibatnya, kebutuhan mereka yang berbeda harus diperhitungkan, sehingga masing-masing mendapatkan manfaat yang seimbang dari pelaksanaan program seperti FORCLIME.

Mempromosikan pengarusutamaan gender di sektor Kehutanan yang seringkali didominasi oleh laki-laki merupakan bagian dari kegiatan FORCLIME di kabupaten percontohan di Malinau, Berau dan Kapuas Hulu. Termasuk di dalamnya mengintegrasikan permasalahan gender ke dalam pembangunan KPH, kesiapan REDD+, pengelolaan hutan bersama masyarakat dan penyusunan rencana strategi kehutanan.

Dominasi laki-laki di sektor kehutanan juga terlihat dalam buku ini, sebagaimana cerita kebanyakan disampaikan oleh laki-laki. Namun demikian, perempuan juga mengalami perubahan, beberapa cerita disampaikan di dalam buku ini.

Ada kisah tentang perempuan-perempuan yang tidak lagi khawatir akan keselamatan suami mereka setelah menerapkan praktik-praktik pemanenan madu hutan secara berkelanjutan. Perubahan positif lainnya adalah meningkatkan kesadaran kepala desa untuk melibatkan perempuan dalam pertemuan-pertemuan, sehingga para perempuan dapat menyampaikan kebutuhannya. Pelatihan mengenai pengarusutamaan gender telah membantu dalam meningkatkan penyadartahuan tentang persoalan-persoalan yang ada dan mempercepat praktik pelaksanaannya.



## Cerita 25: Perubahan Cara Panen Madu Membuat Ibu-ibu Tidur Tenang

*Kelompok Penutur: Anggota dan Pemuka Masyarakat*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

**“Bagi kami yang paling penting perubahan cara panen dan pengelolaan madu karena bapak tidak harus pergi panen malam hari sehingga kami tidak khawatir akan keselamatan mereka, juga kami dapat tambahan uang belanja dari hasil penjualan madu karena kualitas madu kami sudah lebih baik.”**

Ibu-ibu di sini mulai beraktivitas sejak pagi. Ada yang menyadap getah karet, ada yang ke danau mencari ikan dan ada juga yang ke ladang. Yang lainnya ke hutan mengambil rotan. Saat musim ke ladang seperti sekarang ini, ibu-ibu yang ke ladang harus bangun jam 4 pagi. Aktivitas mereka sama dengan yang dilakukan para lelaki.

Kami tidak tahu apa-apa tentang GIZ tapi kami kenal dengan pak Ali dari Dinas Kehutanan. Pak Ali sering bolak balik kemari untuk bertemu dengan bapak-bapak. Kadang pak Ali juga ajak ibu-ibu ngobrol tapi biasanya tidak semua ibu-ibu diajak. Biasanya pak Ali ngobrol tentang hutan desa.

Kami biasa memancing dan mencari rotan di hutan desa. Sebelum ada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) tahun 2013, sudah ada hutan desa tapi tidak diatur dengan baik. Kalau sekarang banyak aturan tapi sebenarnya masih sama seperti dulu. Tidak ada larangan apa pun, semua masih sama. Satu-satunya syarat hanyalah bahwa semua yang ada di dalam hutan desa dikelola, digunakan, dan diambil oleh masyarakat dan dijaga. Salah satu hasil hutan yang kita ambil adalah rotan untuk bikin keranjang dan tikar. Kalau cari kayu, kami hanya cari kayu bakar. Tidak ada yang mencari kayu untuk dijual keluar. Kalau sekarang kan sudah ada peraturan: kalau mau jual harus pakai kelompok, pakai dana bersama dan terus dikelola bersama sampai laku dijual.

Kegiatan ibu-ibu disini sama dengan bapak-bapaknya kecuali ambil madu. Kadang-kadang kami membantu apabila tidak ada yang bisa membantu. Bapak-bapak yang ambil madu karena harus manjat dan perginjanya malam hari. Sejak ada peralatan, para bapak bisa mengambil madu di siang hari. Sekarang kami tidak perlu khawatir lagi tentang keselamatan bapak kalau harus ambil madu malam hari. Dengan peralatan, kualitas madu kami juga menjadi lebih baik. Dulu kami jual seharga Rp50.000 - Rp60.000 per kilo. Sekarang kami bisa menjual Rp90.000. Dengan cara pengolahan madu baru, tangan kami tidak bengkok-bengkok karena harus memeras madu.



Bagi kami perubahan yang paling penting adalah cara panen dan pengelolaan madu. Para bapak tidak harus pergi memanen madu malam hari sehingga kami tidak mengkhawatirkan akan keselamatan mereka. Kami juga mendapat tambahan uang belanja dari hasil penjualan madu karena kualitas madu kami sudah lebih baik.



Cerita ini dituturkan oleh ibu Nurhayati, ibu Epi, ibu Nurma, ibu Erniwati, dan ibu Laila. Ke-5 ibu ini adalah penduduk Desa Nanga Lauk. Dalam kesehariannya, ibu-ibu ini selain melakukan kegiatan rumah tangga juga bekerja menangkap ikan, mengambil getah karet, mencari rotan di hutan dan atau berladang. Desa Nanga Lauk termasuk dalam Kecamatan Embaloh Hilir. Sampai saat ini untuk mencapai Desa Nanga Lauk harus menggunakan sampan sekitar dua jam dari Desa Nanga Nyabau. Kehidupan mereka sangat dekat dengan sungai dan hutan. Masyarakat di Desa Nanga Lauk adalah masyarakat dari Suku Melayu. Masyarakat mendapatkan pelatihan panen madu lestari yang difasilitasi oleh GIZ dan mendapatkan peralatan panen dari AOI/Kaban.

## Cerita 26: Dapat Mendatangkan Tenaga Ahli dengan Lebih Fleksibel

*Kelompok Penutur: Pemerintah Pusat*

*Asal cerita: Jakarta*

**“Pemahaman mereka mengenai pengarusutamaan gender menjadi lebih cepat, mereka lebih terinformasi dengan baik.”**

Perubahan paling mendasar yang saya rasakan dengan adanya binaan dari FORCLIME adalah keleluasaan untuk mendatangkan tenaga ahli. Kementerian memiliki standar biaya yang kadang tidak memungkinkan untuk mendatangkan tenaga ahli. Dengan bantuan GIZ kami jadi lebih leluasa untuk mendatangkan tenaga ahli yang lebih berkompeten dengan bayaran yang lebih tinggi sehingga ada keleluasaan juga dalam melaksanakan aktivitas di lapangan. Kalau dengan dana APBN saja, kami tidak akan mungkin bisa membayar tenaga ahli yang dapat melakukan pendampingan sehari-hari untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dengan adanya keleluasaan ini, aktivitas

dapat dirancang lebih terperinci, bervariasi dan dapat diulang sehingga memungkinkan pertukaran pengetahuan yang lebih baik. Dalam konteks pengarusutamaan gender di Berau dengan dukungan GIZ, misalnya, kami mendatangkan tenaga ahli dan sejak itu kami bisa sering mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Kehutanan, aparat desa dan masyarakat. Mereka menjadi lebih cepat memahami pengarusutamaan gender dan menjadi lebih berwawasan. Mereka bahkan sekarang sedang melakukan uji coba perangkat gender yang juga didukung oleh GIZ.

Perubahan lain yang dirasakan berkaitan dengan publikasi. Kami sudah melakukan banyak hal yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender namun belum kami publikasikan. GIZ membantu kami memublikasikannya dalam selebaran yang kemudian kami bagikan dalam forum-forum.

Selain itu, GIZ juga mendukung pembuatan model kegiatan yang responsif terhadap gender di Agam (Sumatera Barat), Sumba Timur (tahun 2013) dan di Berau (akhir 2014). Model ini sudah diadopsi oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA).



Cerita ini dicitrakan oleh pak Teguh Prio, Koordinator Administratif Biro Perencanaan. Keterlibatan pak Teguh dalam FORCLIME terkait dengan tugasnya sebagai koordinator data di dalam kelompok kerja gender.

## Cerita 27: Tidak Sia-sia Saya Mengikuti Pelatihan Gender

*Kelompok Penutur: Anggota dan Pemuka Masyarakat*

*Asal cerita: Berau, Kalimantan Timur*

**“Sejak itu saya sering mengundang ibu-ibu dalam pertemuan perencanaan pembangunan dan mengakomodir permintaan khusus dari mereka.”**

Setelah mengikuti pelatihan gender, saya menyadari betul bahwa keterlibatan perempuan sangat penting dalam memajukan pembangunan kampung dan desa. Sejak itu saya sering mengundang ibu-ibu dalam pertemuan perencanaan pembangunan dan menampung permintaan khusus dari mereka. Dulu perempuan disini diremehkan; sekarang mereka senang bisa ambil peran dan terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan kampung, misalnya terkait potensi wisata air terjun di desa ini. Bagi mereka ini menjadi kehormatan. Sebelumnya saya hanya mengundang ibu-ibu yang memang memiliki jabatan di desa.

Selain melibatkan perempuan dalam pertemuan desa, saya sampaikan juga kepada masyarakat agar tidak membeda-bedakan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Saya katakan bahwa baik anak-anak laki dan anak perempuan bisa bersekolah dan mengerjakan pekerjaan di rumah. Tidak ada pantangan bagi anak perempuan dan anak laki-laki.

Perbedaan peran antara anak laki-laki dan anak perempuan memang masih ada hingga sekarang di desa ini namun saya terus berupaya memanfaatkan setiap pertemuan untuk menjelaskan tentang kesetaraan gender. Sebelumnya, anak laki-laki tidak diijinkan mencuci dan melipat baju sementara anak perempuan ragu untuk membantu mencari kayu. Sekarang sudah mulai ada perubahan.

Perubahannya memang cepat terjadi karena masyarakat memperhitungkan serta menghargai pemimpinnya; apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka, itu juga yang mereka lakukan. Saya juga berupaya menjadi pemimpin yang menjadi contoh bagi warganya. Saya menerapkan kesetaraan peran di dalam keluarga saya sendiri.

Sebelum saya mengikuti pelatihan ini, saya menganggap gender itu tentang perempuan saja. Saya baru tahu gender ternyata mencakup baik laki-laki maupun perempuan, tergantung perannya. Itu yang paling saya ingat dari pelatihan gender selain soal pentingnya keterlibatan perempuan. Ternyata gender mempunyai pengertian yang luas.

Bagi saya, perubahan yang terjadi pada banyak orang dalam masyarakat itu merupakan perubahan yang paling berarti karena berarti saya tidak sia-sia diberi kepercayaan oleh Dinas Kehutanan untuk mengikuti pelatihan. Saya merasa berharga juga.

Cerita ini dituturkan oleh ibu Surya Emi, Kepala Desa Tepian Buah Kabupaten Berau sejak tahun 2011. Pada bulan Februari 2015 lalu, ibu Emi menjadi peserta pelatihan gender yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas dukungan GIZ.

## Tema 7. Pembelajaran

Kisah-kisah Perubahan Paling Signifikan (*Most Significant Change*-MSC) tidak hanya berisi cerita tentang keberhasilan. Pengalaman negatif yang dirasakan oleh mitra FORCLIME dan dampak yang tidak diperkirakan merupakan pembelajaran yang berharga. Pembelajaran tersebut dapat membantu FORCLIME dalam mengaji pelaksanaan kegiatan dan memperbaiki strategi untuk mendapatkan hasil yang lebih positif.

Kebanyakan dari penutur cerita dalam buku ini mengalami perubahan positif, namun beberapa orang melihat ada ruang untuk perbaikan. Misalnya penutur cerita dari pemerintah daerah di provinsi, anggota masyarakat dan Kelompok Kerja Madu Hutan Kalimantan Barat. Lambatnya perkembangan suatu kegiatan disebabkan kurangnya kehadiran staf FORCLIME dalam menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan, terbatasnya pertukaran data dan hasil, dan janji-janji yang tidak ditepati.

Terlepas dari kekecewaan yang ada, masyarakat mengharapkan interaksi yang lebih bermakna dengan FORCLIME di masa depan. Pengalaman positif dari penutur lainnya dan kekayaan pengetahuan, ide dan keterampilan yang diperoleh melalui keterlibatan dengan FORCLIME merupakan alasan utama hubungan yang saat ini terjalin dengan FORCLIME.

FORCLIME sangat berterima kasih atas pembelajaran yang didapat dan akan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan saat menyusun perencanaan kegiatan kedepan.



## Cerita 28: Komunikasi adalah Hal Penting untuk Terjadinya Perubahan

*Kelompok Penutur: Anggota dan Pemuka Masyarakat*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

**“...makanya data hutan desa kita banyak yang tercecer.”**

Sebelum menjadi kepala desa, saya tidak terlalu terlibat dengan kegiatan GIZ. Awalnya saya terlibat kegiatan GIZ saat jadi kepala desa tahun 2012. Saya mengikuti kegiatan pemetaan partisipatif untuk mengatasi sengketa tentang tata batas yang sebenarnya sudah berlangsung lama. Pemetaan partisipatif ini sebenarnya sih bagus tapi masyarakatnya agak sensitif soal ini. Yang kita lakukan sudah sesuai aturan dan petunjuk teknis di lapangan. Dari mengikuti kegiatan ini, kami mendapat pengalaman. Itu hal baru bagi saya. Kami jadi tahu bahwa pendekatan perencanaan partisipatif yang digunakan bukan semata-mata tentang pembuatan dan pencetakan peta. Kami juga harus mengenali tanda batas desa kita. Rancangan peta ini belum sepenuhnya bisa dipakai karena masih belum ada kesepakatan tentang tata batas. Sepanjang pengamatan saya, tidak semua tokoh dilibatkan karena di satu dusun banyak tokoh utama. Dulu masalah batas ini sudah ditangani oleh

Lanting Borneo sementara WGT baru-baru ini saja terlibat. Itulah sebabnya Pak Camat masih mempertanyakan WGT apakah mereka sudah mengikuti prosedur atau tidak. Kita juga tidak tahu siapa yang mewakili WGT untuk berkomunikasi dengan kecamatan. Dan karena akhir-akhir ini saya pun melihat permasalahan ini makin meruncing, saya melakukan antisipasi dengan menghubungi pihak kepolisian dan Koramil untuk mengatasi masalah ini. Itu sebabnya Pak Camat menghubungi saya dan menyampaikan hal itu, karena melihat reaksi dari masyarakat termasuk saya.

Ada banyak manfaat yang dipetik dari keterlibatan dalam proses bersama WGT, seperti mengetahui bagaimana kita menangani konflik, bagaimana menggali sejarah, dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan berbagai pihak. Ada banyak kepentingan di desa ini, misalnya kepentingan pemerintah, kepentingan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), KPH, dan juga perusahaan. Alur proses penyelesaian masalah itu yang bermanfaat bagi kami. Kami masih sangat kekurangan dari segi informasi dan pengalaman terutama dalam kaitannya dengan dunia luar. Kegiatan pemetaan konflik ini sangat penting karena ini telah benar-benar membantu agar tidak ada gesekan antar masyarakat.



GIZ juga mendorong dan memfasilitasi hutan desa sejak 2010. Saya pernah ikut ke Lampung untuk melihat bagaimana proses pengelolaan hutan desa. Disana kami melihat masyarakat membuat kerajinan dan kami mengunjungi perkebunan dan usaha mereka. Kami ingin menerapkan hasil kunjungan kemarin tetapi hak kelola hutan desa belum juga disetujui. Jarak tempuh dari desa ke desa juga cukup jauh sehingga sulit untuk membuat kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu masyarakat melihat adanya banyak pertemuan namun tanpa ada realisasi; akibatnya masyarakat menjadi enggan terlibat. Proses ijin pengelolaan hutan desa ini makan waktu lama dari 2010 hingga sekarang dan sampai saat ini belum disetujui. Tidak ada dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, padahal kami dihimbau untuk mulai melakukan

aktifitas. Hubungan kami dengan GIZ tidak ada masalah, tapi komunikasi perlu diperbaiki supaya program yang dibawa ke desa ini lebih lancar. Contohnya ada sebagian data kami di pak Ali, sebagian di pak Ismet dan sebagian lagi di pak Ian. Mereka ini juga jarang saling bertemu karena kesibukan sehingga data hutan desa kami banyak yang tercecer. Sepertinya ada juga ketidakpercayaan terhadap kapasitas Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) untuk mengelola keuangan.

Bagi saya pribadi, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan GIZ, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru, terutama mengenai penyelesaian konflik. Tetapi untuk di masyarakat sendiri, saya lihat belum ada perubahan bermakna karena masih belum mencapai target-target yang kita harapkan.



Cerita ini dituturkan oleh pak Husen. Pak Husen adalah Kepala Desa Menua Sadap sejak tahun 2012. Desa Menua Sadap adalah salah satu desa binaan GIZ untuk hutan desa. Desa Menua Sadap juga merupakan salah satu daerah kerja KPH. Saat ini belum ada kesepakatan tentang tata batas antara Desa Menua Sadap dan Pulau Manak. Ini dalam proses mediasi yang dilakukan oleh *Working Group Tenure* (WGT).

## Cerita 29: Sub Sentra Madu Nanga Lauk Tertinggal Dua Langkah

*Kelompok Penutur: LSM*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

**“Di desa-desa ini (yang bukan dampingan GIZ – penulis) sudah ada organisasi, pengurus, inspektur internal, di Nanga Lauk (dampingan GIZ – penulis) tidak ada, belum ada sistemnya. Sistem ini penting karena GIZ tidak selamanya ada di Kapuas Hulu.”**

Interaksi saya dengan GIZ lebih dalam konteks kerangka kelompok kerja (Pokja) madu hutan. Staf GIZ dan saya sama-sama menjadi anggota kelompok kerja madu hutan. Pokja ini merupakan bagian dari sistem inovasi daerah yang dipimpin oleh bupati. Tujuannya adalah untuk mendapatkan usulan-usulan yang inovatif dari bawah untuk dijalankan oleh pemerintah. Para anggota Pokja madu hutan antara lain adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut), GIZ, AOI, Riak Bumi, Bappeda, dan Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disperdagkop). Interaksi antar institusi tidak ada karena GIZ lebih masuk ke KPH sementara kami diluar KPH.

Selain sama-sama di Pokja, kami juga pernah bekerja sama di Nanga Lauk. Saat itu Disbunhut dan GIZ mengadakan pelatihan madu lestari dimana kami ikut serta dan kami juga diberikan peralatan. Nanga Lauk sebenarnya masuk sebagai sub sentra madu hutan tetapi karena Nanga Lauk ini adalah desa binaan GIZ, kami tidak masuk. Karena ada GIZ kami menahan diri agar tidak tumpang tindih. Kami hanya mendampingi empat desa. Keterlibatan kami di Nanga Lauk terbatas. Kalau ada kegiatan mereka kami ikut. Kalau tidak ada kami juga pasif.

Selain itu, staf GIZ yang berperan besar dalam penyusunan dan persetujuan proposal yang diajukan kepada Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan. Proyek ini merupakan

lompatan yang besar dalam pengembangan madu hutan. Jumlah kawasannya bertambah, dari satu daerah menjadi empat daerah. Dahulu hanya 150 anggota yang dilatih dalam panen lestari sekarang ada 900. Ini semua berkat dukungan dari kawan-kawan, termasuk staf GIZ ini. TFCA tertarik karena ide-idenya dalam proposal dan lobi yang dilakukan oleh staf GIZ.

Perubahan yang paling penting dengan keberadaan GIZ di Nanga Lauk ini adalah lambatnya perkembangan pengelolaan madu hutan di desa tersebut. Sub-sentra madu hutan lainnya yang sudah kami kunjungi lebih maju dua langkah. Di desa-desa ini sudah ada organisasi, pengurus, inspektur internal sementara di Nanga Lauk tidak ada dan belum ada sistem yang terbentuk. Sistem ini penting karena GIZ tidak selamanya ada di Kapuas Hulu.



Cerita ini dicitrakan oleh pak Irawan Sihombing, Direktur Perkumpulan Aliansi Organisasi Indonesia (AOI) Kaban. Pak Irawan bisa berhubungan dengan GIZ karena sama-sama menjadi anggota Kelompok Kerja Madu Hutan.

## Cerita 30: Berkurangnya Intensitas Staf GIZ

*Kelompok Penutur: Pemerintah Propinsi dan Kabupaten*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

**“Intensitas yang berkurang dari staf GIZ ini adalah perubahan yang sangat mendasar bagi saya karena beliau termasuk orang yang sangat aktif, idenya inovatif.”**

Jujur saya belum banyak mengetahui program-programnya. Setahu saya Program GIZ di Kapuas Hulu bekerja sama dengan beberapa SKPD. Saya sendiri berinteraksi dengan GIZ saat membentuk Pokja Pariwisata. Pokja beranggotakan berbagai pemangku kepentingan dan mempunyai visi bersama mewujudkan ekowisata yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan yang berbasis masyarakat. Kelompok Kerja (Pokja) Ekowisata dibentuk tahun 2014 dan telah menghasilkan Peta Jalan Pengembangan Ekowisata Kapuas Hulu.

Salah satu orang yang terlibat dalam Pokja ini adalah staf GIZ. Secara pribadi saya sering berkomunikasi dengan staf GIZ. Kami mendiskusikan program-program yang bisa dijalankan. Program-program GIZ ini sangat erat kaitannya dengan program ekowisata. Kami sendiri belum punya rancangan induk untuk pengembangan ekowisata Danau Sentarum sebagai destinasi utama. Akan sulit mengembangkan Danau Sentarum ini jika menggunakan kebijakan-kebijakan secara parsial. Selama ini tanggung jawab soal pariwisata selalu diembankan kepada kami padahal pembangunan pariwisata bersifat multisektoral. Staf GIZ pernah menawarkan diri untuk membantu mencari konsultan namun ini belum terlaksana.

Kami satu-satunya kabupaten yang sudah membuat peta jalan pariwisata. Staf GIZ menyumbangkan ide-ide dan sangat aktif dalam pengembangan peta jalan tersebut. Selama empat bulan belakangan inilah staf GIZ ini sibuk karena mungkin harus berbagi dengan tugas-tugas lain. Berkurangnya keterlibatan staf GIZ dalam forum ini adalah perubahan yang sangat mendasar bagi saya karena beliau termasuk orang yang sangat aktif dan mempunyai gagasan yang inovatif. Tanpa dia rasanya ada sesuatu yang hilang. Kehadiran beliau memberi warna dalam diskusi dalam pengembangan pariwisata daerah.



Cerita ini dicitrakan oleh pak Darmawan Isnaeni, yang saat ini menjabat sebagai staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu. Pak Darmawan dan staf GIZ adalah sama-sama anggota Kelompok Kerja Ekowisata. Saat ini pak Darmawan adalah Koordinator Pokja.

## Cerita 31: Perubahan Belum Nyata Tapi Sudah Mulai Terlihat

*Kelompok Penutur: LSM*

*Asal cerita: Pontianak, Kalimantan Barat*

**“Komunikasi antara pemerintah daerah dan NGO menjadi lebih terbuka, saling mendengarkan.”**

Bila berbicara tentang perubahan, kita perlu melihat periode waktu intervensi proyek, dalam konteks ini proyeknya GIZ. Sepengetahuan saya proyek GIZ fase pertama itu 3 tahun, setelah fase pertama selesai dilakukan evaluasi. Kemudian masuk fase kedua dengan pendekatan berbeda. Nah, menurut saya, di tiga tahun pertama, tidak banyak perubahan yang dapat dilakukan. Saya lihat GIZ masih mencoba mencari pola bagaimana sebaiknya pendekatan *government-to-government* program ini untuk bisa diimplementasikan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu. Salah satu contohnya, ditiga tahun pertama itu, Dinas Kehutanan belum mengerti mekanisme penggunaan anggaran sehingga *underspend* sangat besar. Selanjutnya mereka mencoba strategi baru di fase kedua, dari tiga tema menjadi enam tema. Dan di fase kedua ini saya melihat mesti ada perubahan, terutama terkait dengan pendekatan yang berbeda dan lebih intens melibatkan masyarakat di desa dalam proyek FORCLIME ini. Di masyarakat desa nampaknya ada semacam pembelajaran dan pendidikan karena masyarakat dilibatkan dalam perencanaan sehingga mereka bisa menyuarkan kebutuhan mereka.

Cerita ini dituturkan oleh bapak Albertus Tjiu. Pak Albertus adalah Manajer Program WWF-Kalbar Indonesia. Sebelum menjadi Manajer Program WWF-Kalbar, pak Albertus adalah Project Leader Kapuas Hulu, WWF-Indonesia Program Kalbar yang berbasis di Putussibau. Beliau tidak terlibat langsung dengan Program FORCLIME, namun sering berinteraksi dengan staf GIZ.

Selain GIZ, banyak organisasi yang bekerja di Kapuas Hulu dan semua mempunyai tujuan yang sama, mendukung program *Heart of Borneo*. Keberadaan GIZ yang berkantor di Dinas Perkebunan dan Kehutanan seperti mengubah cara pandang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ke NGO. Komunikasi antara pemerintah daerah dan NGO menjadi lebih terbuka, saling mendengarkan. Keberadaan GIZ juga memberi perubahan di jajaran pemerintahan terutama staf mulai dari level Kepala Bidang sampai staf biasa, tetapi tidak di semua orang. Pengamatan saya, perubahan ini terjadi terutama di level pimpinannya, tapi tidak juga di top level – namun terjadi di *second-layer*. *Second layer* ini kelihatan sangat kuat dan punya kemampuan yang meningkat. Sayangnya saya tidak melihat perubahan tersebut di level staf. Saya tidak tahu apakah kemauan belajar kurang atau tidak dapat kesempatan tapi intinya saya tidak melihat perubahan yang signifikan. Nah, menurut saya dengan tujuan GIZ ingin



meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di jajaran pemerintah, ada baiknya juga level di bawah Kepala Bidang itu juga mendapat perhatian khusus agar ada proses kaderisasi dan saat GIZ *phase-out*, mereka bisa meneruskannya.

Kalau bicara tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), KPH Kapuas Hulu adalah salah satu KPH di Kalimantan Barat yang berkembang cepat dan harus diakui ada intervensi GIZ dalam hal ini. Dalam perkembangannya, dengan munculnya UU nomor 23 tahun 2014, terkait dengan pembagian wewenang provinsi-kabupaten menjadikan prosesnya berjalan tersendat-

sendat. Peranan GIZ untuk mendorong program KPH sudah cukup maksimal, selebihnya tergantung dari proses berikutnya bagaimana pemerintah Provinsi dan Kabupaten berbagi kewenangan dan peran. Mengenai perubahan yang diharapkan, meskipun belum nampak nyata, namun sudah mulai mengarah ke arah perbaikan tata kelola kehutanan yang lebih baik. Hal yang penting untuk mendorong proses ini adalah peletakan dasar di pengembangan kapasitas sumber daya manusia.



## Cerita 32: Perubahan Cara Pikir

*Kelompok Penutur: Pemerintah Propinsi dan Kabupaten*

*Asal cerita: Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*

**“Peningkatan SDM ini penting karena akan berubah juga mindset dan skills. Untuk staf di level menengah ke bawah peningkatan kapasitas terjadi peningkatan pada skills. Sedangkan untuk di level pengambil kebijakan adalah perubahan mindset.”**

Saya melihat perubahan-perubahan penting terkait sumber daya manusia dengan adanya GIZ. Memang tidak banyak orang yang berubah dengan adanya GIZ namun dari jumlah yang kecil tersebut kami telah membangun jaringan di lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Sebagai contoh, GIZ memfasilitasi kecamatan-kecamatan di lima kabupaten untuk melihat praktik pengelolaan hutan oleh KPH di Yogya. Setelah mengikuti kunjungan tersebut, kami bisa nyambung saat berdiskusi dengan mereka. Demikian juga, saat bicara urusan organisasi, Kabag Hukum mengerti mengenai KPH.

Kegiatan GIZ lebih ke pelatihan-pelatihan. Memang pernah ada yang mempertanyakan, mengapa begitu besar dana yang dihabiskan namun tidak pernah kelihatan barangnya. Bagi saya pribadi, saya meyakini bahwa pengembangan SDM akan membuat segalanya lebih mudah. Contohnya banyak teman dari dinas-dinas lain yang mendapatkan bantuan namun SDM mereka tidak tahu cara pelaksanaannya karena tidak ada pelatihan dan pendampingan. Akhirnya bantuan tersebut menjadi sia-sia.

Cerita ini dituturkan oleh pak Indra Kumara. Pak Indra menjabat sebagai Kepala DPMU sejak 2012-2015. Saat bersamaan pak Indra adalah Kepala Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Perkebunan (2011-2015). Sejak 2015, pak Indra bekerja sebagai konsultan untuk proyek ADB -*Sustainable Forest and Biodiversity Management*. Pak Indra mengikuti perkembangan FORCLIME mulai sejak studi kelayakan di tahun 2007.

Membangun SDM penting karena akan bisa mengubah cara pandang dan keahlian. Untuk staf di tataran menengah ke bawah, peningkatan kapasitas difokuskan untuk keterampilan. Untuk di tataran pengambil kebijakan, fokusnya pada perubahan cara pandang. Ketika pengambil kebijakan paham mengenai hal ini, biasanya staf di tingkat bawah akan lebih mudah mengikuti. Belajar dari pengalaman adalah kuncinya. Saat kita dalam tekanan untuk melakukan semua hal dengan cepat di masyarakat, dan pengambil kebijakan meragukan, anggaran tidak akan bisa turun dan selesai sudah. Kalau sekarang kan enak. Ketika ada perubahan cara pandang para pengambil kebijakan, kita bisa menyampaikan berapa jumlah anggaran yang kita perlukan, dan mereka akan menjawab “Ya sudah, diatur saja. Kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan.” Segala sesuatu tentang madu, misalnya, sekarang menjadi lebih mudah. Karena bupati sudah memberikan persetujuan dan banyak bukti kecil yang sudah kita tampilkan, pak bupati justru sekarang mendorong kami untuk menganggarkan berbagai hal untuk tahun depan. Jadi kalau produk memang jelas mempunyai nilai ekonomi, akan lebih mudah untuk mendekati pengambil kebijakan. Karena pada saatnya nanti proyek akan selesai dan dari mana lagi dana akan bersumber kalau tidak dari pemerintah?



## Langkah Kedepan

Perubahan itu ibarat sebuah pohon; dia tumbuh dari kecil, makin lama makin besar. Akarnya makin kuat, cabang dan rantingnya makin banyak. Daunnya pun makin rimbun. Dia berbunga dan berbuah pada waktunya. Tentu saja, tak ada perubahan yang terjadi begitu saja. Dia pasti dihasilkan dari perubahan lain. Perubahan-perubahan itu saling berkaitan. Mustahil terjadi Ekonomi Hijau tanpa perbaikan tata kelola hutan dan pengembangan KPH. Pengembangan KPH tidak mungkin terjadi tanpa kebijakan tentang hutan yang mengaturnya. Pusdiklat sebagai 'ibu' yang melahirkan manusia-manusia yang berkualitas untuk mengelola hutan perlu terus diasah kemampuan sumber daya manusianya. Pada akhirnya, semua bermuara ke masyarakat, perempuan dan laki-laki; perempuan dan laki-laki bisa memetik manfaat sebagai buah dari program FORCLIME.

Secara keseluruhan, sebanyak 85 cerita telah dikumpulkan oleh FORCLIME pada bulan Agustus 2015. Hasil analisis dari cerita yang dikumpulkan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dan lokasi pelaksanaan program, ditemukan tema yang umum, yaitu pengembangan kapasitas manusia, penguatan kelembagaan dan perubahan cara pikir. Hal ini menunjukkan kekuatan FORCLIME di setiap aspek tersebut.

Melalui buku ini, yang berisi 34 cerita terpilih, FORCLIME berbagi sebagian suara dengan mitra kerjanya dan lembaga-lembaga pendanaan, dan masyarakat lebih luas.

Menyusun Kisah-kisah Perubahan Paling Signifikan (*Most Significant Change*-MSC) merupakan pengalaman belajar bagi program FORCLIME sendiri terkait dengan bagaimana staf FORCLIME dan mitra-mitranya telah menyebabkan terjadinya perubahan penting bagi masyarakat dan hutan di Indonesia.





Buku ini juga merupakan cara untuk memberikan umpan balik bagi penutur cerita. Cerita yang dikumpulkan menggambarkan topik-topik perubahan prioritas, mengindikasikan proses yang sekiranya akan didukung oleh program di masa depan. Produk tambahan umpan balik, seperti pembuatan brosur atau poster yang menggambarkan cerita-cerita perubahan berdasarkan topik atau lokasi, sebaiknya disusun untuk menyampaikan informasi yang lebih baik mengenai kelompok penutur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan MSC dan penyelenggaraan program FORCLIME.

Hasil temuan dari MSC akan melengkapi sistem pemantauan berbasis hasil (*results-based monitoring system*) yang dimiliki FORCLIME. Karena pengumpulan cerita untuk MSC ini berlangsung di bulan Agustus 2015, maka kisah yang dituturkan merefleksikan kejadian pada masa itu. Selama program FORCLIME berjalan, perubahan akan terus terjadi.

Pelaksanaan pengumpulan cerita tambahan di daerah, dan menjadikan MSC sebagai bagian integral dari kegiatan pemantauan dan evaluasi berkala merupakan tujuan di tahun tersisa yang dimiliki program. Dengan mengangkat pandangan baru ke dalam proses perubahan, keputusan yang tepat dapat diambil untuk mempromosikan perubahan positif.







